



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER GENERIK

Kata Pengantar

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah menyelesaikan revisi Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Generik. Revisi tersebut telah difinalisasi oleh Ibu. Hj. Ir. Rini Soemarno dan Bapak H. Dr. Yusuf Supiandi, MA.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Hj. Ir. Rini Soemarno dan Bapak H. Dr. Yusuf Supiandi, MA yang telah menyelesaikan revisi Buku Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Generik yang disesuaikan dengan PMK 104/PMK-02/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Tim Penyusun, serta menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam proses penyusunan dan finalisasi pedoman ini.

Kamipun menyadari bahwa Buku Pedoman ini masih memerlukan masukan-masukan yang lebih membangun untuk efektifnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender di semua bidang pembangunan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pengguna buku ini demi penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Buku Pedoman PPRG ini dapat memberikan kontribusi bagi efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Jakarta, Juli 2010
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak RI

Sekretaris Kementerian

Dra. Sri Danti, MA





SAMBUTAN

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI

Pembangunan Nasional pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik laki-laki, perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, mereka yang memiliki kebutuhan khusus, manusia usia lanjut, remaja puteri dan putera, anak usia dini. Peningkatan kualitas SDM dapat dilaksanakan melalui berbagai macam program pembangunan meliputi program prioritas dan penunjang.

Ruang lingkup dari buku pedoman ini meliputi program prioritas yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK-02/2010 dan PMK Nomor 119/2009 yaitu agar dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dapat mengintegrasikan perspektif gender di masing-masing K/L yaitu Kementerian dan Lembaga yang menangani program prioritas pembangunan yang meliputi bidang Politik, Sosial, Hukum dan Ekonomi serta K/L lainnya yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Buku Pedoman ini merupakan hasil review dari Buku Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Generik yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Advokasi dan Sosialisasi Tahun 2009 yang beranggotakan 18 (delapan belas) K/L.

Dengan terbitnya PMK Nomor 104/PMK-02/2010 yang mencantumkan antara lain agar dalam penyusunan RKA-KL dapat mewujudkan program dan kegiatan yang berbasis kinerja, maka dipandang perlu untuk menerbitkan suatu pedoman perencanaan dan penganggaran untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang ada. Alat yang digunakan untuk analisis gender adalah Gender Analisis Pathway (GAP) yaitu suatu alat untuk menggali isu gender, mengidentifikasi penyebab kesenjangan antara perempuan dan laki-laki pada peran, akses, kontrol dan partisipasi serta manfaat dalam semua bidang pembangunan, serta mengidentifikasi faktor penyebab internal dan eksternal, dan menyusun rencana aksi serta baseline data dan indikator. GAP sebelumnya juga telah diperkenalkan dalam penyusunan RKA-K/L Tahun 2010 sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMK Nomor 119/2009 di 7 (tujuh) K/L.

Harapan kami kiranya, buku Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan bagi para penanggung jawab program dan kegiatan para perencana sektor di unit kerja



perencanaan K/L dan diharapkan menjadi inspirasi dan referensi di dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi semua kebijakan, program dan kegiatan K/L di masa-masa yang akan datang.

Akhirnya saya berharap dengan terbitnya Buku Pedoman PPRG ini semua K/L semakin dapat memahami, manfaat dari pentingnya melaksanakan Strategi Pengarusutamaan Gender di instansi masing-masing, khususnya di dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan.

Jakarta, Juli 2010
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak RI

Linda Amalia Sari SIP.



Ringkasan Eksekutif

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Generik

Pedoman perencanaan dan penganggaran responsive gender generik merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap sumber daya, partisipasi dan mempunyai kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang sama dari semua bidang pembangunan. Sampai saat ini masih banyak laki-laki dan perempuan yang mengalami diskriminasi, akibat perencanaan dan penganggaran yang belum optimal menggunakan analisis gender/analisis situasi.

Pedoman perencanaan dan penganggaran responsive gender dapat digunakan oleh para pelaku perencanaan program dan kegiatan, serta penganggaran di semua program prioritas bidang pembangunan khususnya pada bidang politik, sosial, hukum dan ekonomi. Serta Pedoman ini juga sebagai acuan dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam semua tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di semua bidang pembangunan.

Perencanaan responsive gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya. Dalam rangka perencanaan yang responsive gender perlu dilakukan **analisis gender** pada semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sedang direncanakan. Dalam melakukan analisis gender adalah menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP) sesuai amanah Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Anggaran belanja responsif gender dibagi atas **3 kategori**, yaitu:

- A. Anggaran khusus target gender**, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.
- B. Anggaran kesetaraan gender**, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan.
- C. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender** adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun *capacity building*.



Landasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dari perencanaan dan penganggaran yang responsif gender adalah: Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang penyusunan RKP, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang penyusunan RKA-KL, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2007 tentang Keuangan Daerah, Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009, Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Keuangan No. 119/ PMK.02/ 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan No. 104/ PMK.02/ 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada dan terlebih lagi jangan diartikan sebagai rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki.



Tim Penyusun

Narasumber

| | | |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departemen Keuangan | : | Drs. Zunaedi |
| Pakar Gender | : | Dr. Yulfita Rahardjo, APU |
| KPP & PA | : | 1. Dra. Sri Danti, MA 2. Dr. Ir. Hertomo Heroe, MM 3. Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, MM |

Kontributor

| | | |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K/L | : | Semua Anggota Pokja Data, Adsos, dan Monev Tahun 2009 ¹ |
| KPP & PA | : | 1. Ir. Siti Khadijah Nasution, MM 2. Dra. Valentina Ginting, M.Si 3. Ir. Endah Prihatiningtyastuti, M.Si |

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| <i>Diterbitkan oleh</i> | : | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|

Tim Revisi

| | | |
|--------------|---|----------------------------------------------------|
| Pakar Gender | : | H. Dr. Yusuf Supiandi, MA Hj. Ir. Rini Soemarno |
|--------------|---|----------------------------------------------------|

| | | |
|--------------------|---|-------------------|
| <i>ISBN</i> | : | 978-979-3247-44-1 |
|--------------------|---|-------------------|

| | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| <i>Disain & Layout</i> | : | interaxi |
|-----------------------------------|---|----------|



Daftar Isi

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kata Pengantar | i |
| Sambutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia | iii |
| Ringkasan Eksekutif | v |
| Tim Penyusun | vii |
| Daftar Isi | ix |
| | |
| BAB I. Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud, Tujuan dan Sasaran | 3 |
| a. Maksud | 3 |
| b. Tujuan | 3 |
| c. Sasaran | 4 |
| d. Ruang Lingkup | 4 |
| e. Landasan Hukum | 5 |
| | |
| BAB II. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional | 7 |
| | |
| BAB III. Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran | 9 |
| A. Latar Belakang | 9 |
| B. Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) | 11 |
| 1. Arsitektur Organisasi, Program, Kinerja dan Alokasi Pagu | 11 |
| 2. Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja | 12 |
| 3. Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja Tingkat Nasional | 13 |
| 4. Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja Tingkat K/L | 14 |
| | |
| BAB IV. Penyusunan Data Terpilah | 17 |
| A. Pentingnya Data Terpilah | 17 |
| B. Sumber Data | 17 |
| C. Sifat Data | 18 |
| D. Pemanfaatan Data Terpilah | 19 |



| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB V. Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) | 23 |
| A. Apa itu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. | 23 |
| B. Mengapa perlu menyusun PPRG melalui GBS. | 24 |
| C. Cara Menyusun PPRG | 26 |
| D. Tahapan menyusun PPRG | 28 |
| 1. Format GBS dan Penyusunannya | 32 |
| 2. Contoh GBS. | 34 |
| E. Siapa Yang Mengerjakan PPRG. | 36 |
| | |
| BAB VI. Contoh Alur Analisis Gender (Gender Analysis Pathway – GAP) . . | 39 |
| A. Alur Menyusun Perencanaan Responsif Gender | 39 |
| 1. Langkah-langkah Contoh Analisis Gender – Dirjen Cipta Karya Tahap Analisis Situasi | 40 |
| B. Langkah-langkah Menyusun Penganggaran Yang Responsif Gender . . | 41 |
| 1. Tahap Analisis Situasi | 41 |
| 2. Tahap Penyusunan Kegiatan/Sub-Kegiatan | 43 |
| 3. Penyusunan Indikator Kinerja | 44 |
| 4. Langkah-langkah Penyusunan GBS. | 45 |
| 5. Contoh-contoh GBS Hasil Uji coba dari 7 (tujuh) K/L | 46 |
| | |
| BAB VII. Pemantauan dan Evaluasi | 47 |
| A. Pemantauan dan Evaluasi. | 47 |
| B. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi PPRG | 48 |
| C. Indikator Keberhasilan | 48 |
| | |
| BAB VIII. PENUTUP | 51 |
| | |
| Daftar Pustaka. | 53 |
| Istilah dan Definisi. | 55 |



A. PERMENKEU NO. 119/PMK.02/2009

1. Gender Budget Statement Departemen Pertanian – Ditjen Pengolahan Hasil Pertanian – sub-kegiatan Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
2. Gender Budget Statement Departemen Pekerjaan Umum – Ditjen Sumber Daya Air - sub-kegiatan Pembangunan Jaringan Air Baku;
3. Gender Budget Statement Departemen Pekerjaan Umum - Ditjen Sumber Daya Air - sub-kegiatan Pamantauan Kualitas Air
4. Gender Budget Statement Departemen Pekerjaan Umum – Ditjen Bina Marga – Review Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang Responsif Gender
5. Gender Budget Statement Departemen Pekerjaan Umum – Ditjen Cipta Karya – sub-kegiatan Pembinaan PAMSIMAS
6. Gender Budget Statement Departemen Pekerjaan Umum –Ditjen Penataan Ruang Sub-kegiatan Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/ Diseminasi/ Seminar/Publikasi

Diagram 1: Sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional (SPPN)

Diagram 2: Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Terpadu

Diagram 3: Arsitektur Organisasi, Program, Kinerja dan Alokasi Pagu

Diagram 4: Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja

Diagram 5: Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja Tingkat Nasional

Diagram 6: Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja Tingkat K/L

Diagram 7: Gender Analysis Pathway (GAP)





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki dan perempuan, merupakan salah satu sasaran tujuan pembangunan nasional. Dalam mengukur peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diukur antara lain dengan tiga indeks yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender-related Development Index* (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measurement* (GEM). Dalam IPM/HDI Indonesia telah menunjukkan adanya peningkatan 0,687 Tahun 2004 menjadi 0,719 Tahun 2008, namun dalam IPG/GDI dan IDG/GEM menunjukkan masih adanya kesenjangan, yang mengindikasikan masih besarnya perbedaan manfaat pembangunan yang diterima oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. GDI Indonesia, yang dihitung berdasarkan variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi, walaupun mengalami peningkatan dari 0,639 pada tahun 2004 menjadi 0,664 pada tahun 2008 (KNPP dan BPS), tetapi masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai HDI di tahun yang sama. Peningkatan GDI tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-94 dari 177 negara. Di antara negara-negara ASEAN, GDI Indonesia termasuk dalam peringkat yang rendah. Sementara itu, GEM Indonesia, yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan; juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 0,597 pada tahun 2004 menjadi 0,623 pada tahun 2008 (KNPP-BPS). Namun demikian, peningkatan nilai GEM yang kecil setiap tahunnya mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan, ekonomi, dan politik, belum signifikan.

Sebagai contoh yang nyata dalam bidang ekonomi bahwa kebijakan ekonomi makro serta krisis ekonomi tidak sensitif pada isu gender dan berpotensi berdampak pada ke-ketidakadilan gender. Hasil pembangunan yang ternyata belum termanfaatkan secara setara oleh laki-laki dan perempuan: terbatasnya akses dan kontrol perempuan di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih kecil (38,26%) dibandingkan laki-laki (62,74%), angka pengangguran perempuan (10,8%) lebih besar dibandingkan laki-laki (8,1%), daya beli perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dari hasil sintesa dari banyak studi kasus yang berkaitan dengan angkatan kerja, berkesimpulan adanya segregasi gender yang 'tersembunyi' dalam angkatan kerja perempuan di sektor informal, sehingga kontribusi ekonomi perempuan tidak sepenuhnya masuk dalam perhitungan ekonomi makro.



Namun demikian sangat sedikit perhatian atau analisis gender yang berkaitan dengan pengaruh ekonomi makro, termasuk krisis ekonomi; atau sebaliknya pengaruh gender terhadap krisis. Hal ini berkaitan dengan sifat ekonomi makro yang agregat, sehingga indikator ekonomi makro yang dipakai juga bersifat makro/agregat, seperti Pendapatan Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi, pajak, volume ekspor, dan inflasi. Untuk mengetahui bagaimana semua itu tercermin dalam kehidupan nyata dalam masyarakat, perlu diukur indikator kesejahteraan masyarakat dengan data terpilah (misalnya melalui indikator kemiskinan, status pekerjaan, pengangguran, status kesehatan, putus sekolah, dan sejenisnya). Karena masyarakat beragam, maka kesejahteraan itu juga bisa berbeda menurut daerah perkotaan dan pedesaan, status sosial-ekonomi, suku bangsa, golongan masyarakat, seperti orang tua, anak-anak, petani, nelayan, kelompok marginal dan juga menurut gender.

Isu gender dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat sebagai target pembangunan terdiri dari segmen-segmen yang berbeda khususnya perempuan dan laki-laki. Mereka mempunyai kebutuhan, kepedulian, kesulitan dan pengalaman yang berbeda dalam mengakses, peranserta, dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan. Hasil pengabaian itu akan memunculkan adanya kesenjangan gender, kesenjangan terhadap perempuan bisa juga kesenjangan terhadap laki-laki.

Berbagai masalah yang masih dihadapi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain:

1. Belum melembaganya pelaksanaan pengarusutamaan gender khususnya dalam kebijakan, program, kegiatan terkait perencanaan dan penganggaran baik di pusat maupun di daerah;
2. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
3. Rendahnya akses, partisipasi, dan kontrol, manfaat perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, serta sosial budaya;
4. Adanya peraturan perundang-undangan yang bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan;
5. Belum efektifnya pelaksanaan penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender di tingkat pusat dan daerah;
6. Terjadinya perempuan dan laki-laki yang men-spesialisasi-kan diri pada tugas yang berbeda, pada setting yang terpisah, mempunyai perbedaan dalam akses terhadap posisi tawar dalam perekonomian informal; dan
7. Terdapatnya perempuan yang lebih banyak terlibat di perekonomian informal, karena berbagai alasan antara lain: (1) sesuai dengan peran gendernya, sehingga mudah 'masuk dan keluar'; (2) kelangkaan akses terhadap perekonomian formal, karena adanya *gender stereotyping*; (3) mayoritas tidak memiliki persyaratan formal; persyaratan yang justru tidak dipunyai oleh perempuan.



Selama ini, pengetahuan mengenai gender dalam pembangunan dan upaya mewujudkan kesetaraan gender di bidang ekonomi (ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta infrastruktur); sosial (pendidikan dan kesehatan, lingkungan hidup, sumberdaya alam); politik dan hukum belum begitu menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh sebab itu, selain dukungan serta kemauan politik dari mereka yang berkepentingan terkait dengan semua aspek permasalahan semua bidang pembangunan juga diperlukan *knowledge base*, pemutakhiran data dan informasi, penerapan analisis (analisis gender), untuk dipakai sebagai dasar *policy response* dan advokasi.

Oleh karena itu untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, perlu dilakukan analisis gender yang hasilnya dijadikan bahan acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Berbagai permasalahan harus ditangani secara komprehensif dan seksama, untuk itu perencanaan dan penganggaran harus sesuai dengan prioritas masalah, tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat dan dampak positif baik bagi laki-laki maupun perempuan/anak perempuan, anak laki-laki, mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan yang berbeda, termasuk manusia usia lanjut, remaja putri dan putra, anak usia dini.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

a. Maksud

Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Generik merupakan acuan pada saat penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui pengintegrasian isu gender ke dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran pada semua bidang pembangunan agar kegiatan yang dibiayai dari APBN lebih efisien dan efektif, dan terjamin berkeadilan bagi perempuan, laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki, mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan yang berbeda, termasuk manusia usia lanjut, remaja putri dan putra, anak usia dini.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Pedoman PPRG Generik ini adalah :

1. Menyamakan persepsi para penentu kebijakan, program dan kegiatan mulai dari penyusunan perencanaan dan penganggaran supaya responsif gender;
2. Memberikan arahan dan batasan tentang ruang lingkup perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program dan kegiatan supaya responsif gender;
3. Memberikan pengarahannya tentang tata cara pengintegrasian isu gender kedalam sistem perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan semua kementerian dan lembaga (K/L);
4. Memberikan panduan teknis cara menyusun Renja-K/L, RKA-K/L dan Kerangka Acuan/Term Of Reference (ToR) dan GBS dengan menggunakan indikator kinerja yang responsif gender.



c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari penerapan PPRG Generik ini adalah:

1. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang responsif gender di semua K/L sebagai penanggung jawab masing-masing bidang pembangunan;
2. Diterapkannya anggaran responsif gender dalam semua program dan kegiatan pembangunan;
3. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan semua bidang pembangunan
4. Menurunnya isu gender dalam semua bidang pembangunan sehingga seluruh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup buku panduan ini adalah upaya-upaya terkait dengan pengintegrasian isu gender mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai penyusunan kerangka acuan/term of reference (TOR) dan *gender budget statement (GBS)* sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 119/PMK-02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2010. Permenkeu dimaksud telah diuji-cobakan ke 7 (tujuh) K/L pada tahun 2010, yakni Kementerian PP PA, Kementerian Keuangan, Bappenas, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Pertanian.

Khususnya Pasal 12 yang mencantumkan, hal berikut:

Penjabaran mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Selanjutnya, dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, K/L berkewajiban menyusun RKA-K/L agar Anggaran K/L disusun secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka perlu adanya petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA K/L TA 2011. Untuk itu, telah dikeluarkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tertanggal 19 Mei 2010**, dimana dalam Pasal 8 dicantumkan bahwa pada saat Permenkeu ini mulai berlaku, Lampiran I Permenkeu No.105/PMK.02/2008 jo Permenkeu No. 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA KL dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak diatur kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.



e. Landasan Hukum

1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menetapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang kemudian memberikan peluang bagi pengintegrasian gender kedalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional.
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menetapkan adanya audit kinerja disamping audit keuangan lainnya yang kemudian memberikan peluang untuk mengintegrasikan audit gender kedalam audit kinerja.
4. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan sistem perencanaan multi tahunan nasional yang berbasis prioritas, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menetapkan bahwa penganggaran di daerah harus disusun dengan pendekatan berbasis kinerja yang selanjutnya memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
7. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,
8. PP No. 20 tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), menjabarkan system perencanaan tahunan yang berbasis kinerja yang selanjutnya memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran di pusat;
9. PP No. 21 tahun 2004 tentang penyusunan RKA-KL, menjabarkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang selanjutnya memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran di pusat
10. Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009,
11. PP No. 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah, menetapkan bahwa penganggaran di daerah harus disusun dengan pendekatan berbasis kinerja yang kemudian memberi peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.
12. Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran No. 0142/M. PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/ PMK.02/ 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2010;



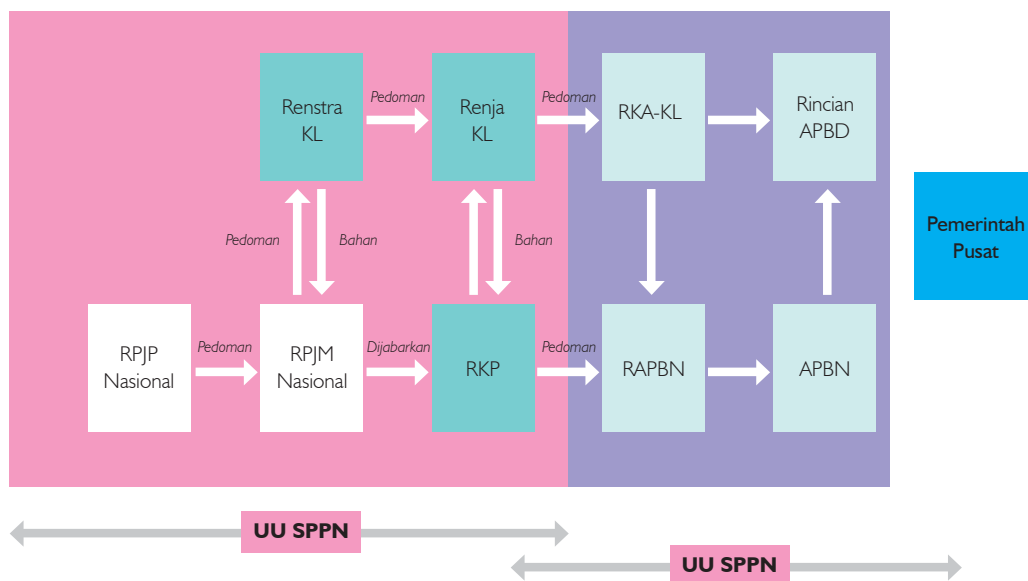
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tertanggal 19 Mei 2010 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011



SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN NASIONAL

Sistem perencanaan dan penganggaran nasional disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan yakni UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional seperti tertera pada Diagram 1

DIAGRAM 1

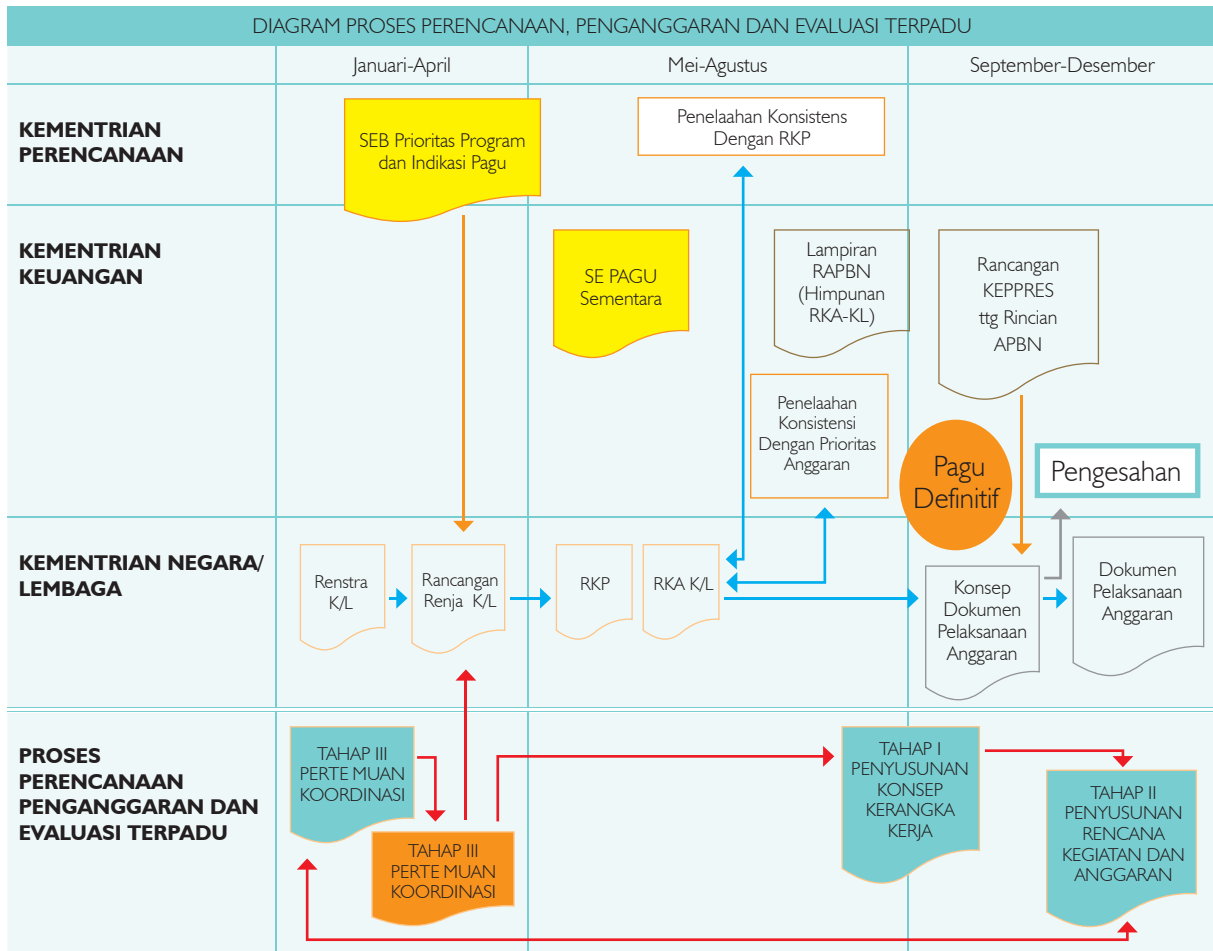


Sumber : Departemen Keuangan

Diagram 1 diatas memperlihatkan sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku secara nasional baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan berpedoman pada RKP yang disusun dengan RAPBN, yang kemudian ditetapkan menjadi APBN. Sedangkan RKA KL yang nantinya akan menjadi rincian APBN disusun berpedoman pada RKP (Pasal 2 Ayat 1 PP No.21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL). Siklus perencanaan dan penganggaran (baca tahun Fiskal) di Indonesia menurut Pasal 4 UU No 17 Tahun 2003 dimulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang sama.



DIAGRAM 2.



Sumber: Kementerian Keuangan

Siklus perencanaan dan penganggaran dalam satu tahun dapat dilihat pada Diagram 2.

Bagan memperlihatkan bahwa Renja KL harus sudah dibuat selambat-lambatnya di bulan April, dengan mengacu pada Renstra KL dan pagu indikatif. Di bulan berikutnya setelah semua Renja KL dikumpulkan oleh Bappenas, dan seluruh anggarannya dibahas bersama DPR RI, maka ditetapkanlah RKP yang telah memuat pagu sementara. Selanjutnya RKP ini digunakan sebagai landasan dalam menyusun RKA K/L. Kemudian kumpulan dari semua RKA K/L dijadikan bahan Lampiran RAPBN. Setelah RAPBN dibahas dan disahkan menjadi APBN maka ditetapkanlah pagu definitif dan selanjutnya RKA K/L menjadi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) K/L.



PEDOMAN REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN²

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyusunan RPJM 2010 – 2014 dan Renstra K/L 2010 – 2014, Kementerian Negara/Lembaga diharapkan sudah mengimplementasikan reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Berkenaan dengan persiapan penerapan reformasi dimaksud, diperlukan upaya-upaya:

1. Penataan kembali program dan kegiatan (restrukturisasi program dan kegiatan) yang disertai dengan kejelasan sasaran pembangunan, indikator kinerja dan penanggungjawab program/kegiatan;
2. Penyediaan indikasi kebutuhan pendanaan jangka menengah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan prioritas berdasarkan proyeksi ketersediaan anggaran (*resource envelope*) jangka menengah; serta
3. Pemantapan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara perencanaan dan penganggaran sejak penyusunan RPJM dan Renstra KL hingga penyusunan RKP, Renja KL, RKA-KL dan DIPA yang didukung oleh system dan informasi (*database*) perencanaan dan penganggaran yang terpadu.

Reformasi perencanaan dan penganggaran diawali dengan diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Peraturan perundang-undangan tersebut telah dilengkapi dengan PP Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), PP Nomor 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). PP Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menekankan pada

² Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran No. 0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009

perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*³, berjangka menengah *Medium Term Expenditure Framework*⁴ dan system penganggaran terpadu (*Unified Budgeting*)⁵

Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah serta penganggaran terpadu merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik (*Public Financial Management*) yaitu: (i) Kerangka kebijakan Fiskal Jangka Menengah (*Medium Term Fiscal Framework*⁶) yang dilaksanakan secara konsisten (*aggregate fiscal discipline*); (ii) Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative sefficiency*) yaitu melalui penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) yang terdiri dari Prakiraan Maju (*Forward Estimates*⁷), Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*), dan Anggaran Terpadu (*Unifies Budget*); dan (iii). Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (*technical and operational efficiency*).

Perencanaan dan penganggaran seperti dimaksudkan di atas masih belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti: (i) Belum digunakannya *resource envelope* sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) dan (ii) Program dan kegiatan beserta indicator kinerjanya belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat ukur efektifitas pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja, dan akuntabilitas kinerja.

Agar penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Anggaran Berbasis Kinerja, dan Anggaran Terpadu dapat dioptimalkan, diperlukan suatu upaya untuk menata kembali struktur program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga (restrukturisasi program dan kegiatan). Restrukturisasi program dan kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) sebagai dasar, (i) Penerapan akuntabilitas Kabinet. Dan (ii) Penerapan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga. Hasil dari restrukturisasi program dan kegiatan tersebut akan diimplementasikan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 dan Renstra K/L 2010-2014

3 Mekanisme dalam meningkatkan manfaat sumber daya yang dianggarkan ke sektor publik terhadap pencapaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) melalui key performance indicator (KPI) yang terkait dengan 3 (tiga) hal yaitu (i) Pengukuran Kinerja, (ii) Pengukuran biaya untuk menghasilkan penggunaan informasi kinerja *outcome* dan *output*, serta (iii) Penilaian keefektifan dan efisiensi belanja dengan berbagai alat analisis

4 Pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

5 Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

6 Pendekatan penyusunan prakiraan *resource envelope* (ketersediaan anggaran) dalam jangka menengah yang sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal jangka menengah (menjaga kesinambungan fiskal/fiscal sustainability)

7 Perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran berikutnya.



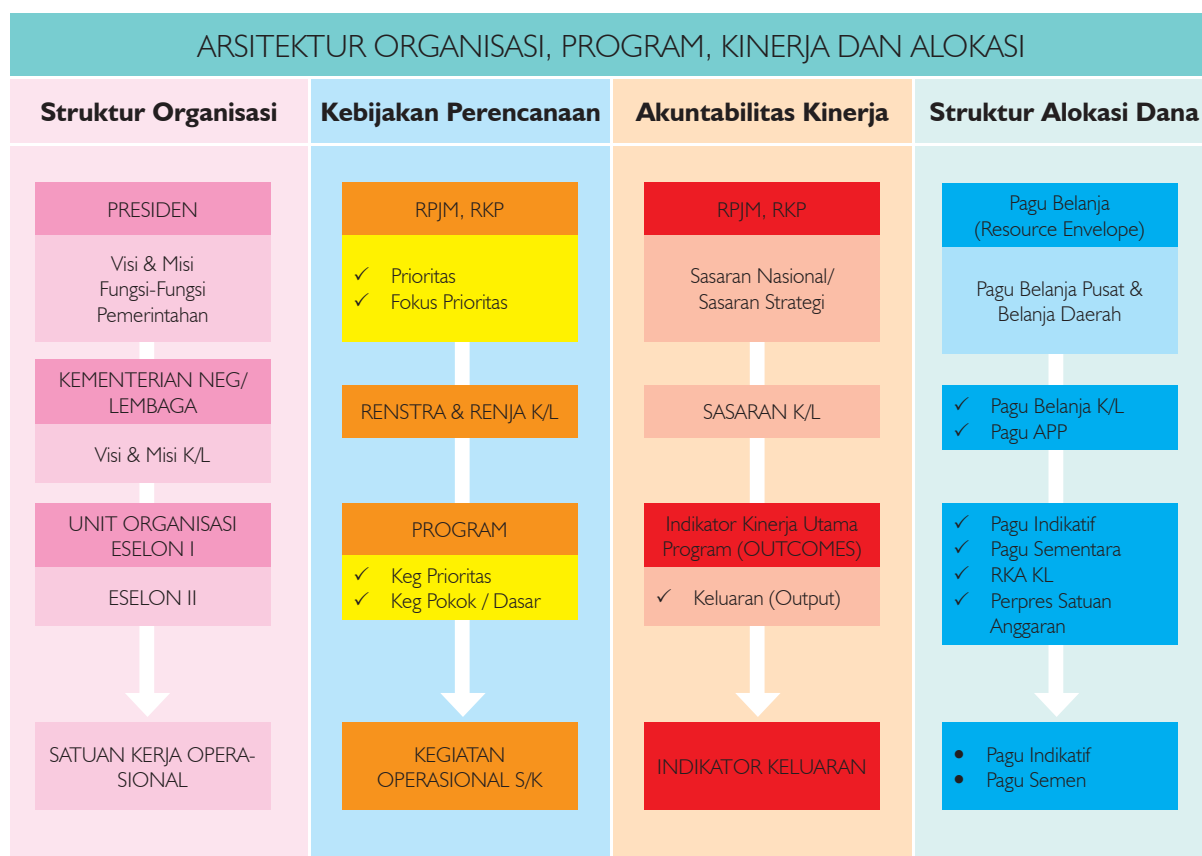
B. KONSEP PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

1. Arsitektur Organisasi, Program, Kinerja, dan Alokasi Pagu

Kerangka logis yang dikembangkan dalam rangka penerapan PBK diuraikan dengan menggambarkan keterkaitan kinerja pada berbagai tingkatan yang dihubungkan dengan alokasi/pagu anggaran, serta dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan.

Jenjang organisasi, kebijakan perencanaan, Akuntabilitas kinerja, dan alokasi dana jika disandingkan dalam satu diagram maka, menghasilkan suatu gambaran susunan atau arsitektur yang mempunyai hubungan/keterkaitan satu sama lainnya, sebagaimana Diagram 3. berikut ini.

Diagram 3. Arsitektur Organisasi, Program, Kinerja, dan Alokasi Pagu



Sumber: Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran No. 0142/M. PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009

Hubungan dan keterkaitan masing-masing jenjang/tingkatan dimaksud dapat dicermati secara bersamaan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan sebagai berikut:

a. Tingkatan I (paling atas)

Visi-misi Presiden tertuang dalam platform yang ditetapkan, dan diterjemahkan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimana secara tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP), termasuk prioritas pembangunan nasional. Tujuan RKP yang ingin dicapai adalah berkurangnya kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan pada tingkat dasar.

b. Tingkatan II

Renstra adalah dokumen visi/misi Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang menerjemahkan visi-misi Presiden, dimana secara tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja K/L (RK K/L) berupa dukungan terhadap pencapaian prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional. Sasaran Renstra 5 (lima) tahun kedepan ingin dicapai, apabila didukung dengan dana yang memadai melalui pagu belanja K/L.

c. Tingkatan III

Unit Organisasi Eselon I menerjemahkan visi-misi K/L sesuai tugas-fungsinya dalam program yang diukur dengan adanya penetapan Indikator Kinerja Utama program. Selanjutnya, suatu program dirinci dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, dimana pencapaian kinerja kegiatan dapat diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Kegiatan, dengan didukung dana melalui pagu belanja perprogram/kegiatan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

d. Tingkatan IV

Satuan Kerja (Satker) menerjemahkan kegiatan yang dilaksanakan Unit Eselon II melalui kegiatan teknis operasional, dimana pencapaian keberhasilannya diukur dengan penetapan Indikator Keluaran, yang akan dapat diwujudkan apabila didukung dengan dana yang memadai dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA).

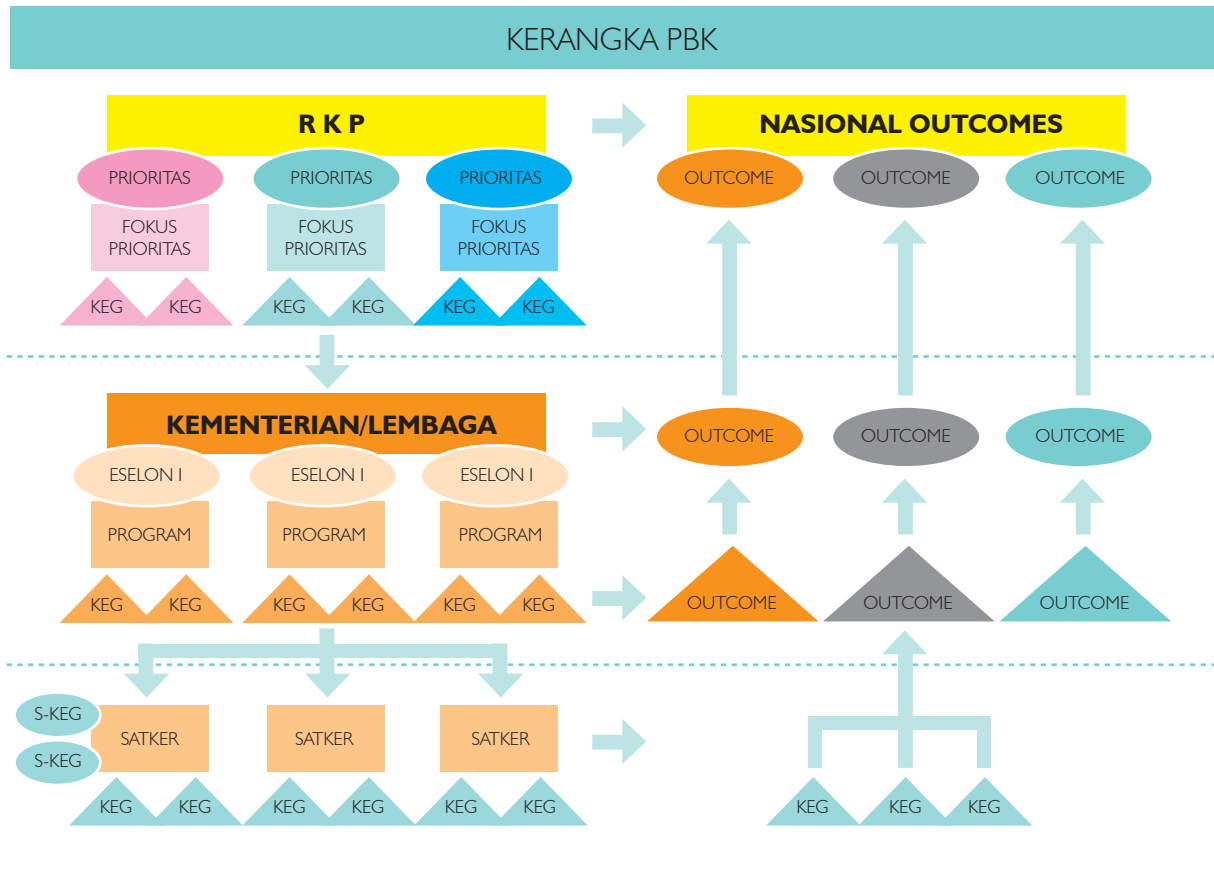
2. Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja

Kerangka PBK secara umum menggambarkan hubungan masing-masing tingkatan kinerja dalam rangka pencapaian *outcome* nasional, sebagai berikut:

- RKP yang berisikan program dan kegiatan Pemerintah menghasilkan kinerja berupa nasional *outcome*
- RKP dilaksanakan oleh K/L beserta unit-unit kerja di lingkungannya menghasilkan kinerja berupa *outcome* pada tingkat K/L. Secara bersama *outcome* K/L tersebut mendukung pencapaian *outcome* nasional.



Diagram 4. Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

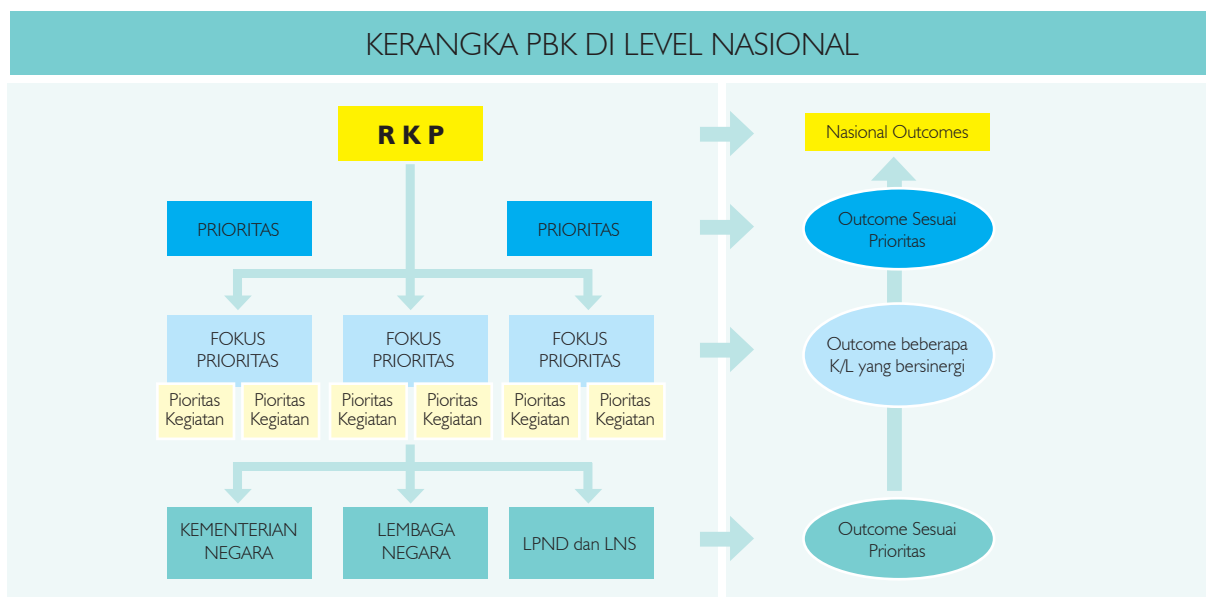


Sumber: Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran No. 0142/M. PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009

3. Kerangka PBK Tingkat Nasional

Dalam rangka pencapaian *outcome nasional*, kerangka PBK tingkat Nasional menggambarkan hubungan masing-masing tingkatan kinerja secara rinci sebagai berikut: (i). RKP terbagi dalam prioritas-prioritas yang menghasilkan kinerja berupa *outcome* sesuai prioritas (*platform* Presiden); (ii). Prioritas tersebut terbagi dalam fokus prioritas yang menghasilkan *outcome* beberapa K/L yang bersinergi; (iii). Fokus prioritas dimaksud dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas yang menjadi tanggungjawab K/L (unit kerjanya) sesuai dengan tugas fungsinya. Kegiatan prioritas menghasilkan *output* untuk mendukung pencapaian *outcome* K/L.

Diagram 5. Kerangka PBK Tingkat Nasional

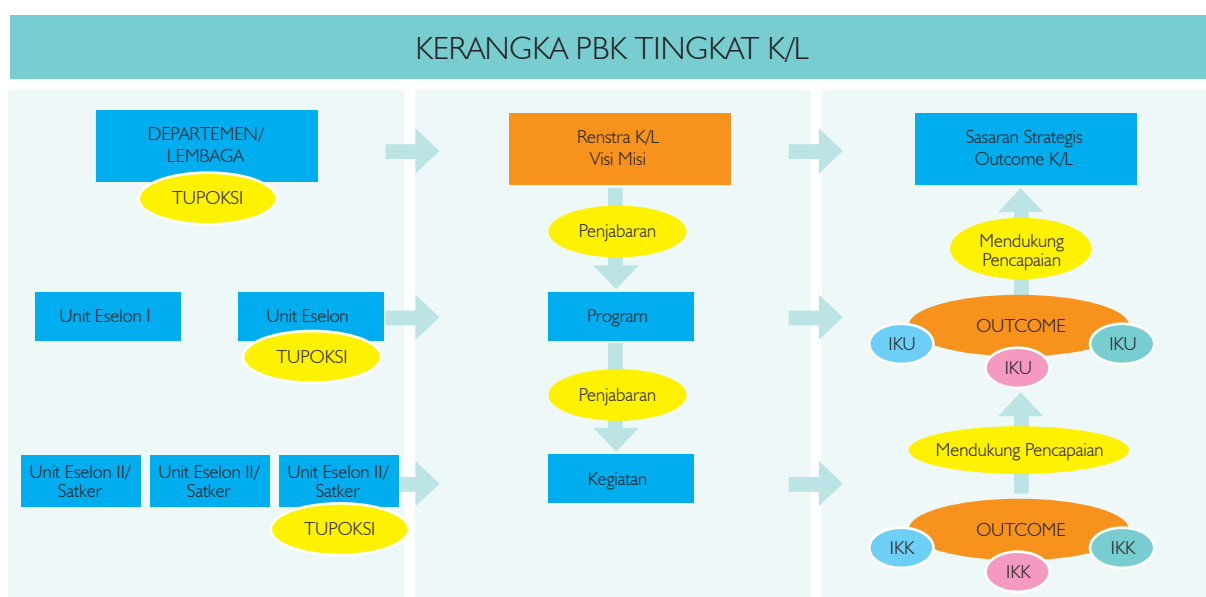


Sumber: Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran No. 0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009

4. Kerangka PBK Tingkat K/L

Hubungan masing-masing tingkatan kinerja secara rinci dalam rangka pendapatan *outcome* K/L, seperti digambarkan dalam kerangka Diagram 5 adalah sebagai berikut: (a). K/L melaksanakan Renstra dan Renja dan menghasilkan *outcome* K/L beserta indikator kinerja utama (IKU); (b). Renstra dijabarkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Unit Eselon I K/L dan menghasilkan *outcome* program; (c). Selanjutnya program dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawab Unit Eselon II-nya dan menghasilkan *output* kegiatan beserta indikator kinerja

Diagram 6. Kerangka PBK Tingkat K/L



Sumber: Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran No. 0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009

Berdasarkan kerangka PBK dan mekanisme penganggaran tersebut diatas dapat dikemukakan 2 (dua) sudut pandang PBK dalam melihat proses perencanaan dan penganggaran.

Pertama, PBK bersifat *top-down* dimana perencanaan dirancang oleh pengambil kebijakan tertinggi di pemerintahan untuk dilaksanakan sampai dengan unit terkecil (Satuan Kerja). Mengenai cara/metode melaksanakan kegiatan menjadi kewenangan unit kerja.

Kedua, PBK bersifat *bottom-up* dimana anggaran di alokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan keluaran. Dan secara bersama keluaran-keluaran kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran program sesuai rencana. Pada akhirnya sasaran program tersebut diharapkan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat.

INFORMASI MENGENAI KINERJA pada berbagai tingkatan (program/ kegiatan) MENDUDUKI PERAN PENTING dalam penilaian, berupa:

- (1) UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN OUTCOME PROGRAM;
- (2). UKURAN KEBERHASILAN KELUARAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM (DARI SISI EFEKTIVITAS), dan
- (3). TINGKAT EFISIENSI PENGALOKASIAN ANGGARANNYA.

Pada dasarnya penganggaran berbasis kinerja akan mengubah fokus pengukuran pencapaian program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker). Kegiatan tersebut semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya bergeser kepada keluaran/hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. Indikator pengukuran kinerja terdiri dari: (a). Indikator *input* merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program; (b). Indikator keluaran (*output*) adalah unit barang/jasa yang dihasilkan suatu kegiatan atau program; (c). Indikator dampak (*outcome*) merujuk pada perubahan pada keadaan kelompok sasaran program sebagai akibat dari pelaksanaan jasa/pelayanan program.

Dengan adanya pendekatan
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA,
dapat memberikan PELUANG bagi
PENGINTEGRASIAN GENDER KE DALAM SISTEM
PERENCANAAN & PENGANGGARAN



DATA TERPILAH

A. PENTINGNYA DATA TERPILAH

Data terpilah penting untuk mengidentifikasi masalah, dan dapat dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, waktu, yang dalam analisisnya menggunakan analisa gender. Bentuk data terpilah bisa kuantitatif dan kualitatif. Dari data terpilah tersebut akan dapat diketahui posisi, kondisi serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Pemetaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki penting dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan, yang akan lebih memudahkan dalam menentukan intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan. Sekaligus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dalam *Gender Budget Statement*. Hal ini juga akan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi, karena data terpilah dan perencanaan serta analisa gendernya jika sudah tersedia, akan mudah membandingkannya dengan kondisi setelah diintervensi.

Dengan demikian dokumentasi, proses monitoring dan evaluasi dalam kerangka kegiatan bisa dilakukan secara menyeluruh dan merupakan tertib administrasi Kementerian/Lembaga serta mendorong proses akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan. Karena dengan tersedianya data terpilah dan analisa gender, secara tidak langsung mendorong anggaran berbasis kinerja.

B. SUMBER DATA

1. **Data primer terpilah** menurut jenis kelamin adalah data terpilah yang secara langsung diambil dari obyek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Data primer dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan antara lain: survei lapangan; *FGD*; *Need Assessment*; pengukuran sampel; identifikasi; pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin lainnya yang langsung dilakukan pada kelompok sasaran



2. **Data sekunder terpilah** adalah data terpilah yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan. melainkan data sekunder terpilah menurut jenis kelamin yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode:
 - a. Sistem Pencatatan Pelaporan (internal) adalah sistem pencatatan dan pelaporan yang secara berjenjang, berkala dan sistematis dilakukan oleh K/L terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
 - b. Data dan Informasi (eksternal) adalah data dan informasi yang bersumber dari luar sistem pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga.

C. SIFAT DATA

- a. **Data Kuantitatif (Terukur)**, adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya jumlah pekerja perempuan dan laki-laki di sektor formal dan informal.
- b. **Data Kualitatif (Tidak Terukur/Atribut/Kategori)** adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya, mengenai persoalan yang dihadapi oleh perempuan pelaku usaha mikro dan hambatan yang dialami oleh kelompok laki-laki dalam pemanfaatan dana bergulir. Data semacam ini dapat diperoleh dari survei maupun penelitian mendalam.

c. Menurut Sumber Datanya

1. Data dasar
Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan umumnya dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau Badan PBB dan Bappenas, misalnya data tentang *gender development index*.
2. Data sektoral
Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sektor. Data ini umumnya dikumpulkan oleh instansi melalui catatan administrasinya. Misalnya data yang harus dimiliki Departemen Pertanian di Badan Ketahanan Pangan adalah bagaimana akses perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya alam disekitar mereka.
3. Data khusus
Data yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk kepentingan spesifik seperti dunia usaha dan lainnya. Dua jenis statistik yang pertama disebutkan diadakan untuk kepentingan pengambil kebijakan publik, pemerintah dan swasta, sedangkan statistik khusus umumnya tidak disiapkan untuk konsumsi publik.



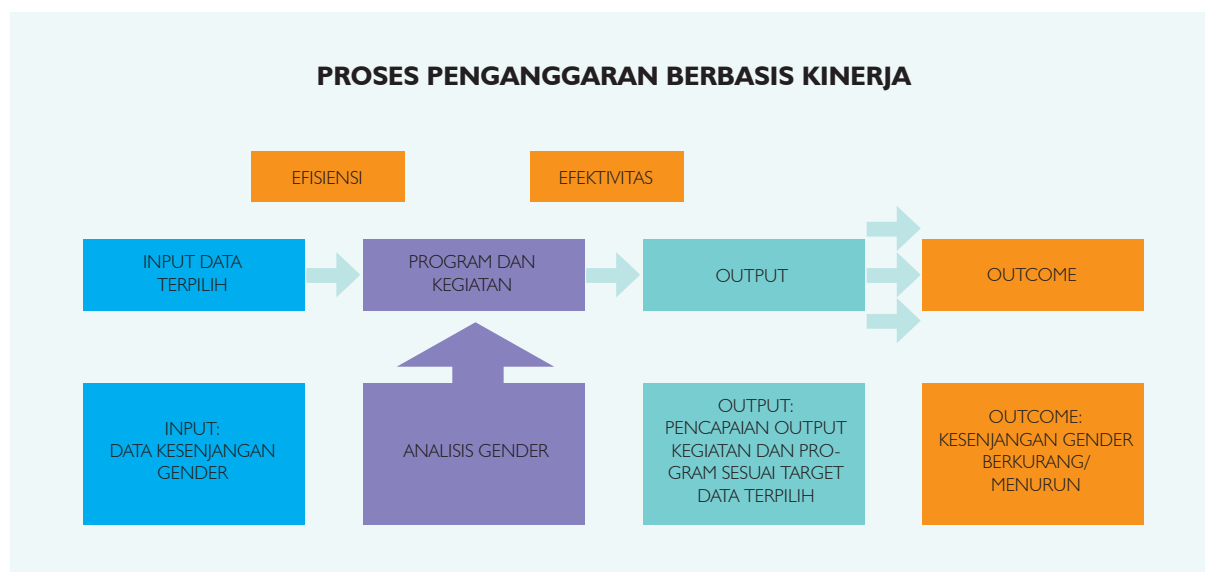
D. PEMANFAATAN DATA TERPILAH

Bila kita berbicara tentang pengumpulan data, perlu juga kita berbicara siapa penggunanya. Hal ini penting sehingga data terpilih yang dikumpulkan dapat bermanfaat dan digunakan secara maksimal. Dalam konteks ini, data terpilih bisa bermanfaat untuk perencana dalam melakukan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan termasuk di dalamnya adalah melakukan mandat terkini penganggaran, tertuang dalam Kepmenkeu N0.119/PMK-02/2009, yakni *Gender Budget Statement/ Pernyataan Anggaran Gender*. Mandat dimaksud telah di uji-cobakan pada tahun anggaran 2010 di 7 (tujuh) K/L, yakni Kementerian PP PA; Menteri Keuangan, Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum.

Selain untuk perencana atau elemen yang terkait dengan program dan kegiatan, dapat juga menggambarkan bagaimana gambaran hasil pembangunan yang telah dirasakan baik di tingkat daerah maupun pusat, hal ini penting saat proses evaluasi dan pelaporan pembangunan.

Pemanfaatan data dalam hal ini **data terpilih** adalah memanfaatkan atau menggunakan data yang telah diolah untuk kepentingan tertentu seperti disebutkan sebelumnya **sebagai baseline data untuk dapat mengurangi kesenjangan** perempuan dan laki-laki **dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan**. Data terpilih bisa digunakan oleh pihak perencana baik itu di SKPD, dalam lingkup K/L maupun anggota kelompok kerja PUG (sebagai alat advokasi) dan tentunya Pusdatin yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam penyediaan data.

Pemanfaatan data terpilih sesuai dengan konteks saat ini adalah dalam upaya implementasi gender budget statement yang merupakan salah satu komitmen dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, seperti yang dijelaskan oleh Dit Sistem Anggaran, Dirjen Anggaran – Kementerian Keuangan seperti dibawah ini.



Data terpilah menjadi salah satu input yang signifikan dalam proses penganggaran berbasis kinerja

Contoh pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin dan analisis gender dapat dimasukkan dalam baris ANALISA SITUASI pada formulir *Gender Budget Statement* (sesuai Permenkeu No. 119-PMK-02-2009) seperti Tabel berikut dibawah ini:

Tabel*)
GENDER BUDGET STATEMENT dengan Data Kuantitatif
Kementerian/Lembaga: Kementerian Pendidikan
Unit Organisasi: Direktorat Pendidikan Non-Formal dan Informal

| | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program | | Pendidikan Non-Formal |
| Kegiatan | | Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Pendidikan Nasional |
| Tujuan | | Untuk mendekatkan akses pendidikan kelompok marjinal yang masih buta huruf dan yang putus sekolah |
| | Sub Kegiatan | Pendidikan Kesetaraan Paket a |
| Analisa Situasi | | <p>Kelompok penduduk usia 7 – 12 tahun yang belum pernah/tidak sekolah lagi; perempuan = 2.28% ; laki-laki = 2.92%</p> <p>Kelompok penduduk usia 13 -15 tahun yang belum pernah/tidak sekolah lagi; perempuan = 15.16%; laki-laki = 16.25%</p> <p>Beberapa hal yang utama menjadi faktor penyebab masih besarnya anak yang tidak sekolah sehingga masih banyak anak yang buta huruf, antara lain sebagai berikut:</p> <p>Kemiskinan menjadi penyebab utama tidak sekolahnya anak-anak. Orang tua yang mengatakan bahwa mereka tidak menyekolahkan anaknya karena biaya: anak perempuan = 36.24%; anak laki-laki = 35.31%</p> <p>Waktu anak perempuan dan anak laki-laki seringkali digunakan untuk kegiatan mencari nafkah membantu orang tua. Anak usia 7 – 18 tahun yang tidak sekolah dengan alasan bekerja atau sedang mencari pekerjaan: perempuan = 10.95%; laki-laki = 36.38%</p> <p>Berdasarkan data pada table 4 angka buta aksara perempuan terus menurun, namun dalam kenyataannya angka buta aksara perempuan masih tinggi disbanding laki-laki.</p> <p>Untuk itu diperlukan program pemberantasan buta aksara dilakukan dengan pendekatan: 1. Penentuan daerah prioritas PKBM melalui system blok, pendekatan vertikal dan horizontal.</p> |
| Kegiatan yang direncanakan | | <p>Menyusun bahan rapat</p> <p>Melaksanakan koordinasi melalui pembentukan SK Panitia</p> <p>Penggunaan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan</p> <p>Melaksanakan kegiatan</p> <p>Membuat pelaporan dan dokumentasi</p> |
| Akun 1 | | Penguatan kapasitas kelembagaan PKBM |
| | Indikator Input 1 | Penguatan kapasitas kelembagaan PKBM dengan melakukan pemetaan dan monitoring baik laki-laki dan perempuan dalam mengelola program-program pendidikan masyarakat yang sesuai dengan kebijakan pusat |



| | | |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun 2 | | Rintisan sinergi program pendidikan non-formal di kawasan tertinggal dan terpencil |
| | Indikator Input 2 | Rintisan sinergi program pendidikan non-formal di kawasan tertinggal dan terpencil dilaksanakan 7 kegiatan |
| Akun 3 | | |
| | Indikator Input 3 | |

*) Mengacu dan diolah dari GBS Pengembangan Kelembagaan Departemen Pendidikan Nasional yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

A. APA ITU PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)?

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang selama ini masih ada, akibat dari konstruksi sosial dan budaya dengan tujuan mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan dan penganggaran responsif gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender: 1). perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor; 2). perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya; 3). penganggaran responsif gender : (1) dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada setiap lingkup pemerintah, perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif; dan secara bersama-sama mereka menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan; (2) anggaran responsif gender penggunaannya diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan; dan (3) anggaran responsif gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis gender dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.

PENGINTEGRASIAN ISU GENDER
mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penganggaran, akan
MENGHASILKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER.

Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi atas 3 kategori, yaitu:

1. **Anggaran khusus target gender**, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;
2. **Anggaran kesetaraan gender**, adalah alokasi anggaran **untuk mengatasi masalah kesenjangan gender**. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;
3. **Anggaran pelembagaan kesetaraan gender**, adalah alokasi anggaran **untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender**, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

B. MENGAPA PERLU MENYUSUN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER MELALUI GENDER BUDGET STATEMENT-GBS?

PERTAMA

Untuk **mendorong percepatan pencapaian** target RPJMN 2010-2014, sampai tahun 2009 semua indikator di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur belum tercapai baik di tingkat nasional, maupun wilayah. Dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender maka pelaksanaan program/kegiatan akan menjadi lebih efektif dan efisien karena telah didahului dengan analisis situasi / analisis gender. Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sekaligus untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kondisi dan situasi kesenjangan perempuan dan laki-laki yang masih terjadi, sekaligus juga dalam melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi misalnya Undang-Undang No. 7/1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan kesepakatan Internasional (*Beijing Platform for Action/BPFA*). Berdasarkan Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, analisis gender merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan di seluruh K/L termasuk SKPD.

KEDUA

Dalam rangka mengimplementasikan amanah kebijakan nasional tersebut diatas, sejak tahun anggaran 2010 dilaksanakan uji coba penyusunan rencana dan anggaran memasukkan *Gender* dengan menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui *Gender Budget Statement (GBS)*, seperti tertuang dalam Permenkeu No. 119/PMK. 02/2009 di 7 (tujuh) K/L, yakni Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian



Pemberdayaan Perempuan; Kementerian Pendidikan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian.

Pada tahun 2011 sesuai Kepmenkeu 104/PMK.02/2010 tertanggal 19 Mei 2010, diterapkan pada K/L yang menerapkan ARG meliputi 7 (tujuh) K/L *pilot* pada tahun 2010 tersebut diatas, ditambah dengan K/L yang menangani Bidang Perekonomian dan Bidang Polsoskum (Politik, Sosial dan Hukum), yang menghasilkan output kegiatan dalam rangka:

- Penugasan prioritas pembangunan nasional;
- Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*); dan/atau
- Pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk didalamnya *capacity building*, advokasi gender, kajian dan pengumpulan data terpilah)

KETIGA

Pendekatan pengarusutamaan gender melalui GBS atau Pernyataan Anggaran Responsif Gender, didahului dengan analisis situasi/analisis gender akan memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara, diantaranya:

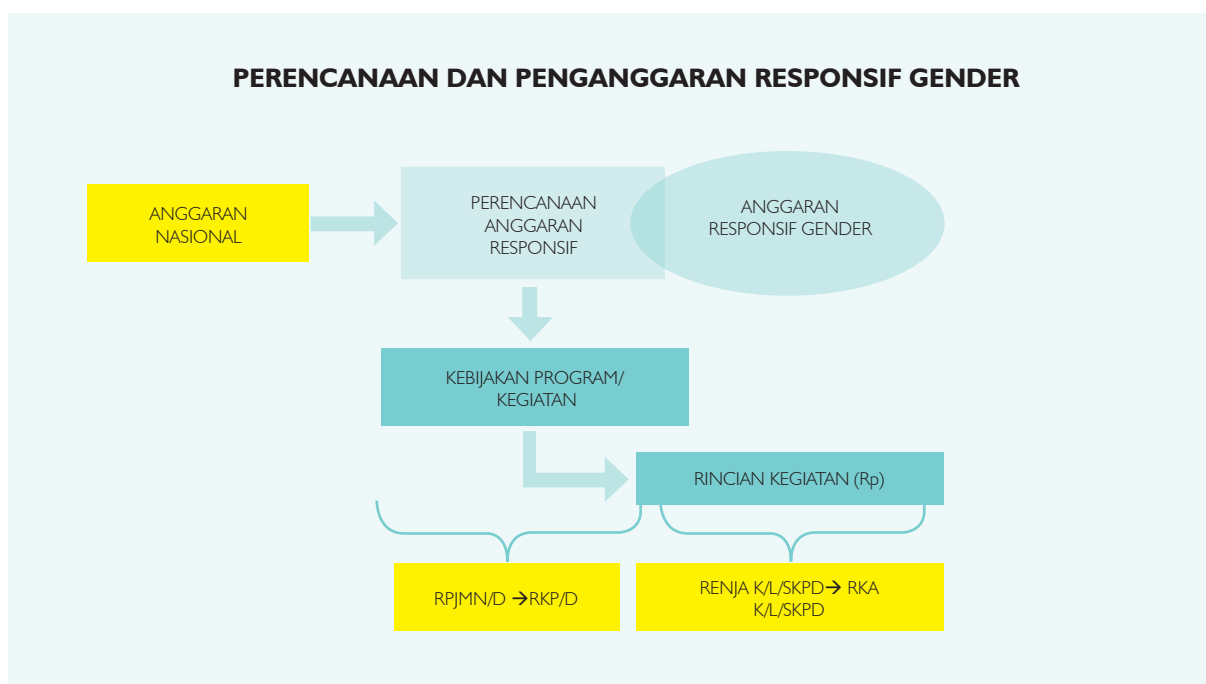
1. **Lebih efektif dan efisien.** Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, kebutuhan laki-laki dan perempuan serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian sebuah perencanaan dan penganggaran responsif gender akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan *affirmative action* apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan;
2. **Mengurangi kesenjangan** tingkat penerima manfaat pembangunan. Dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir. Analisis situasi/analisis gender akan dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, dan dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut;
3. **Menunjukkan komitmen pemerintah** dalam melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta merupakan instrumen penting untuk mewujudkan konvensi dan kesepakatan-kesepakatan dimaksud.



C. CARA MENYUSUN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Selain Pendekatan Penganggaran Terpadu (*Unified Budget*), Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (*Performance Based Budgeting*), dan Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (*Medium Term Expenditure Framework*), yang telah diamanahkan dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pengantar Permenkeu tentang Petunjuk teknis Penyusunan RKA-KL 2009 juga ditambahkan pendekatan dengan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dengan menggunakan analisis situasi/analisis gender berdasarkan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan di setiap bidang pembangunan. Dalam pengantar Permenkeu secara eksplisit dinyatakan bahwa mulai Tahun 2010 dan seterusnya akan digunakan pula analisis gender dalam sistem perencanaan dan penganggaran agar tersusun anggaran yang responsif gender.

Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Analisis situasi/analisis gender harus dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan kebijakan operasional. Dokumen kebijakan strategis meliputi RPJP, RPJMN, Renstra K/L, RKP, Renja K/L dan Pagu Indikatif/pagu sementara. Sedangkan kebijakan operasional meliputi dokumen APBN, RKA-KL dan DIPA. Dokumen kebijakan strategis menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender. Operasionalisasi pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan dokumen Renja K/L. Penyusunan Dokumen Renja menggunakan analisis gender.

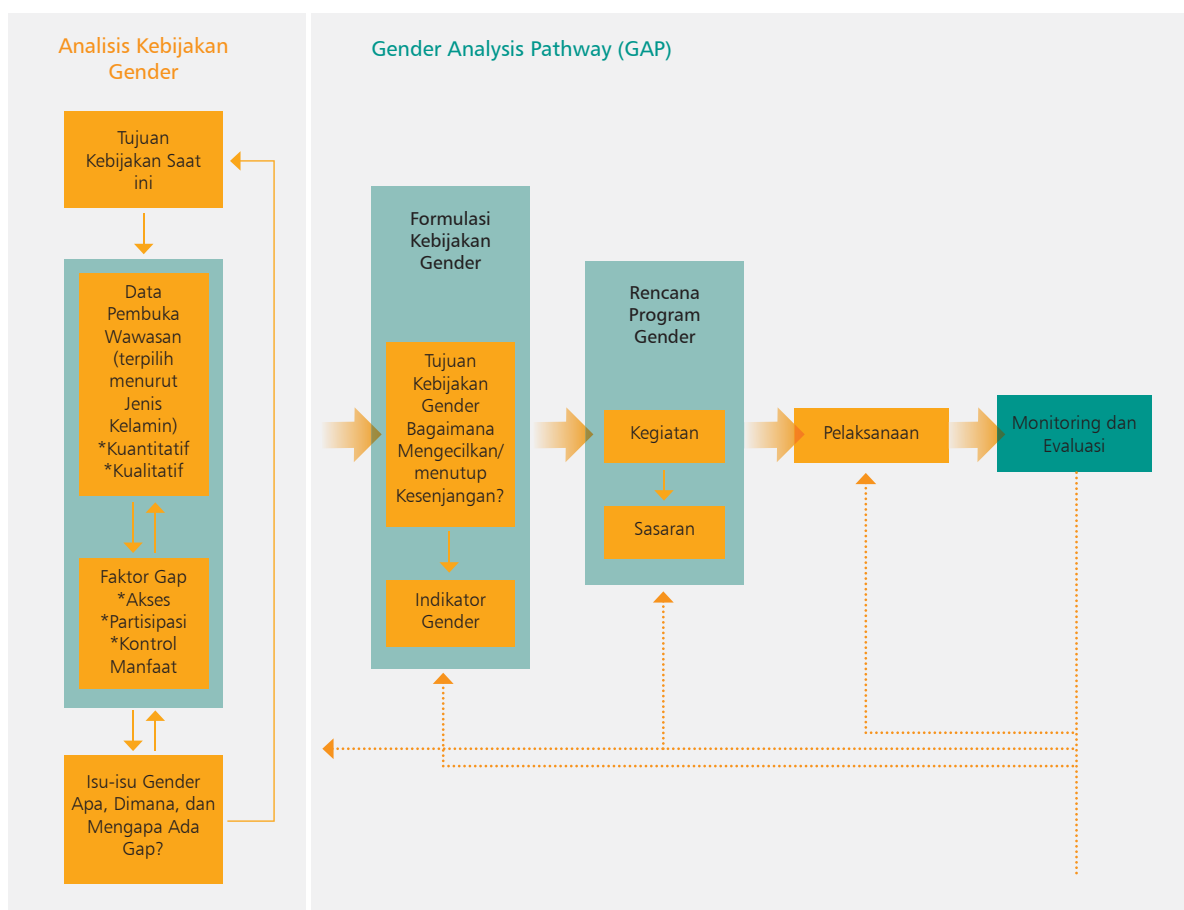


Analisis gender/analisis situasi dimaksud, mengandung muatan sebagai berikut:

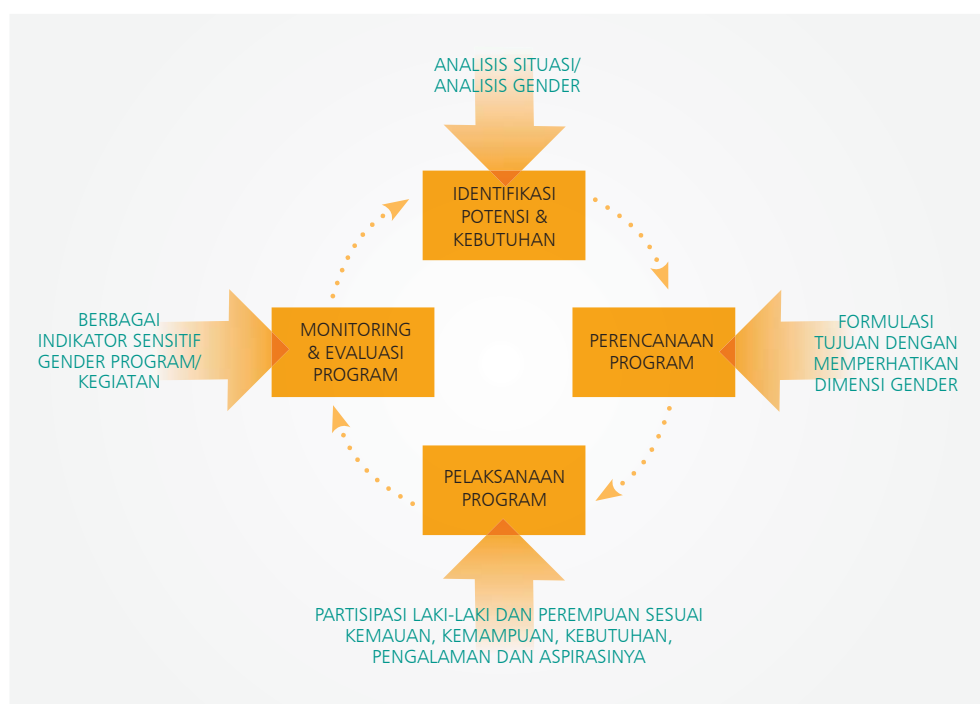
- gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan;
- gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan atau eksternal lembaga masyarakat;
- indikator *outcome* yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan;
- indikator *input* atau *output* yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan/sub-kegiatan.

Salah satu alat analisis gender yang telah diterapkan di Indonesia berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional adalah *Gender Analysis Pathway* atau Alur kerja Analisis Gender (GAP) yang dapat dilihat pada Diagram 7, dibawah ini

DIAGRAM 7



Mekanisme Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender



D. Tahapan Menyusun Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender?

PERTAMA

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di K/L mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran secara nasional. Siklus dimulai dengan penyusunan Renja KL Eselon II oleh penanggung jawab kegiatan pokok di masing-masing Eselon II pada kurun waktu Januari-April, dan dilanjutkan dengan diterimanya pagu indikatif, dan berakhir setelah DIPA dari Kementerian Keuangan pada kurun waktu Agustus-Desember tahun yang sama.

KEDUA

Penyusunan RKA-KL untuk kegiatan tertentu antara lain tentang *Anggaran Responsif Gender*, K/L menyusun RKA-KL yang memuat upaya perwujudan kesetaraan gender dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Gender Budget Statement (GBS)

GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan. Penyusunan dokumen GBS telah melalui analisis gender dengan menggunakan alat antara lain *Gender analysis Pathway (GAP)*.

Untuk output kegiatan yang responsif gender, GBS merupakan bagian dari kerangka acuan kegiatan (*terms of reference*), yang selanjutnya disebut TOR. Penyusunan GBS pada tingkat output telah melalui analisis gender dengan menggunakan alat analisis gender (antara lain *Gender analysis Pathway* atau *GAP*).



GBS pada tingkat output telah melalui analisis gender, merupakan bagian dari kerangka acuan kegiatan (*terms of reference*), yang selanjutnya disebut TOR.

2. Kerangka Acuan Kegiatan (TOR)

Untuk kegiatan yang telah dibuat GBS-nya, maka TOR dari suatu output kegiatan harus menjelaskan terlebih dahulu keterkaitan (*relevansi*) komponen-komponen inputnya terhadap output yang dihasilkan. Selanjutnya hanya pada komponen input yang langsung mendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender perlu penjelasan sebagaimana rencana aksi dalam dokumen GBS.

Secara operasional, perencana memasukkan *perspektif* gender pada beberapa bagian TOR sebagai berikut :

- a. Dasar Hukum Tusi/Kebijakan: pada bagian ini diuraikan secara jelas informasi mengenai output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dan dasar kebijakan berupa penugasan prioritas pembangunan nasional. Selanjutnya diuraikan pula mengenai analisa situasi berkenaan dengan isu gender yang ada dalam rangka menghasilkan output kegiatan dimaksud.
- b. Pelaksanaan kegiatan (termasuk *time table*): pada bagian ini diuraikan komponen input yang mendukung langsung perbaikan ke arah kesetaraan gender. Dengan kata lain bahwa komponen input yang mendukung pencapaian output kegiatan yang *berperspektif* gender harus dapat menjelaskan upaya perbaikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan.

Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-KL berkenaan dengan anggaran responsif gender yaitu:

1. Penerapan ARG pada penganggaran tahun 2011 diletakkan pada output. Relevansi komponen input dengan output yang akan dihasilkan harus jelas.
2. Kriteria kegiatan dan output yang menjadi fokus ARG

Pada tahun 2011, ARG akan diterapkan pada K/L yang menghasilkan output kegiatan:

- a. Dalam rangka penugasan prioritas pembangunan nasional;
 - b. Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*); dan/atau
 - c. Dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk didalamnya *capacity building*, advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi dan/atau pengumpulan data terpilih).
4. ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan kesetaraan gender).
 5. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Prinsip tersebut mempunyai arti:



- a. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
- b. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan;
- c. ARG bukanlah dasar yang "valid" untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
- d. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan;
- e. Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan;
- f. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan;
- g. Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender, namun ada juga kegiatan yang netral gender.

Secara operasional, perencana memasukkan perspektif gender pada beberapa bagian TOR sebagai berikut :

1. Dalam menyusun TOR tetap memakai metoda seperti biasanya yaitu (5W+1H), ditambah dengan penganalisaan tentang ada tidaknya isu gender dalam kegiatan tersebut

KOTAK:

- Apa yang dilakukan kaum laki-laki dan perempuan (dewasa, anak-anak, orang berusia lanjut), dan dimana serta kapan kegiatan-kegiatan ini dilakukan.
- Siapa yang memiliki akses dan pengendalian terhadap sumber daya dan pelayanan, serta pembuatan keputusan.
- Bagaimana pola kegiatan, akses, dan pengendalian dibentuk oleh faktor-faktor struktural (demografi, ekonomi, hukum, dan institusional) dan faktor budaya, agama, serta perilaku?
- Mengapa perencanaan, perancangan, implementasi, pemantauan (monitoring), dan pasca-evaluasi yang peka-gender

2. Agar TOR yang disusun berperspektif gender, perencana hendaknya memasukkan isu gender pada bagian :
 - a. Latar belakang menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan dengan melihat isu gender baik dalam hal akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat terhadap sumber daya (pada bagian ini dapat diambil dari hasil analisis situasi/analisis gender dalam GBS);
 - b. Tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan menjelaskan upaya pelibatan atau konsultasi dengan kelompok sasaran laki-laki dan perempuan;
 - d. Kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi output harus sesuai dengan tujuan kegiatannya.



- e. Untuk melengkapi TOR, harus melampirkan GBS yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang dihadapi, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Gender Budget Statement (GBS) didefinisikan sebagai berikut:

A gender budget statement is a gender-specific accountability document produced by a government agency (ministry or department) to show what its programmes and budgets are doing in respect of gender. A gender budget statement therefore shows: the agency's intention to do something in respect of gender equality; and that the agency is putting money where its mouth is (i.e. budget is following the policy commitment).

Analisis situasi untuk melihat isu gender tersebut harus digambarkan dalam sub-kegiatan dalam lampiran III. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 104/ PMK.02 / 2010 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2011 – Bab I Tata Cara Penyusunan RKA KL dengan format GBS dan Cara Penyusunannya berikut dibawah ini:



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rencana Aksi (Dipilih hanya suboutput/ Komponen yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak Semua suboutput/ Komponen dicantumkan) | Suboutput 1 | Bagian dari suatu Output. Suboutput ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisa situasi | |
| | | Tujuan Sub Output 1 | Uraian mengenai tujuan adanya suboutput setelah dilaksanakan analisis gender. Jika penyusun GBS menggunakan analisis Gender Analisis Pathway (GAP) maka, dapat menggunakan hasil jawaban kolom 6 (enam) pada Format GAP. |
| | | Komponen 1 | Uraian mengenai tahapan pelaksanaan suboutput |
| | | Komponen 2 | Uraian mengenai tahapan pelaksanaan suboutput |
| | | Komponen 3 | Uraian mengenai tahapan pelaksanaan suboutput |
| | | A n g g a r a n Suboutput 1 | Rp. |
| | Suboutput 2 | | |
| | | Tujuan Sub-Output 3 | |
| | | Komponen 1 | |
| | | Komponen 2 | |
| | | Komponen 3 | |
| | | A n g g a r a n Suboutput 2 | Rp. |
| Alokasi Anggaran Output kegiatan | (Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output kegiatan) | | |
| Dampak/hasil Output Kegiatan | Dampak/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi | | |



Contoh GBS

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian Negara/Lembaga : Kesehatan
 Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 Unit eselon II/Satker : Puslitbang Biomedis dan Farmasi

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan |
| Kegiatan | Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan |
| Indikator Kinerja Kegiatan | Meningkatnya produk/model/ prototipe/standar/formula di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan (cantumkan target 2011); Meningkatnya publikasi ilmiah di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan yang dimuat pada media cetak dan elektronik nasional dan internasional (cantumkan target 2011); |
| Output Kegiatan | Laporan/Rekomendasi/model/ prototipe/standar/formula di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan |
| Analisa Situasi <i>(diharapkan tersedia angka kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan. Jika tidak hanya berupa gambaran bahwa output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu)</i> | <p>Isu gender pada “Riset Determinan gangguan otot rangka (nyeri pinggang) pada paramedic RS di Jakarta”:</p> <p>Hasil Riskesdas 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Depkes RI diperoleh prevalensi penyakit sendi pada masyarakat Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan atau gejala cukup tinggi (30,3%).⁹</p> <p>Di Indonesia, gangguan otot rangka pada pekerja merupakan 60% dari penyakit akibat kerja yang dilaporkan.</p> <p>Cidera perut/lutut/pinggul dimana laki-laki 6,6%, perempuan 7,6%</p> <p>Lorusso A et al pada penelitiannya prevalensi nyeri pinggang bervariasi lebar antara 33-86% . Hasil suatu survey yang dilakukan di negeri Belanda pada masyarakat pekerja memperlihatkan bahwa prevalensi nyeri pinggang yang terjadi dalam 1 tahun pada laki-laki sebesar 44,4% dan pada perempuan sebesar 48,2%.</p> <p>Yang menderita nyeri sendi berdasarkan hasil riskesdas 2007 Perempuan 32,2 %, laki-laki 28,2%</p> <p>Kategori Laki-Laki Perempuan</p> <p>Cidera Lutut,Perut, Pinggul 6,6% 7,6%</p> <p>Nyeri Pinggang 44,4% 48,2%</p> <p>Nyeri Sendi (Riskesdas 2007) 32,2% 28,2%</p> <p>Gangguan mental (SKRT 2001) 1,6% 2,5%</p> <p>Gangguan mental (Riskesdas 2007) 9,0% 14,0%</p> <p>Kesenjangan internal yang terjadi : Stereotipe dalam penugasan paramedis laki2 dan perempuan.</p> |



| | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <p>Sebab internal: Belum memiliki data tentang nyeri pinggang pada paramedis</p> <p>Sebab eksternal: Beban ganda paramedis perempuan Lingkungan kerja</p> <p>Oleh karena itu tujuan penelitian direformulasi menjadi penelitian yang menghasilkan informasi penelitian nyeri pinggang berbasis gender</p> <p>Isu gender pada "Riset identifikasi genotip HIV1 pada orang dengan HIV-AIDS": Mmmmm mmmmmmmmmmm mmm mmmm mmmmmmmmmmm mmmm mm mm mmmmmmmm mmmmm mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm mm</p> | | | |
| Rencana Aksi | Suboutput 1 | Riset Determinan gangguan otot rangka (nyeri pinggang) pada paramedic RS di Jakarta | | |
| | | Tujuan Suboutput 1 | Menganalisis determinan gangguan otot rangka pada petugas paramedis laki-laki dan perempuan | |
| | Suboutput 2 | Komponen 1 | Studi pustaka | |
| | | Komponen 2 | Persiapan | |
| | | Komponen 3 | Instrumen yang responsif gender | |
| | | Komponen 4 | Ujicoba instrument | |
| | | Komponen 5 | Pelaksanaan penelitian | |
| | | Komponen 6 | Analisa data | |
| | | Komponen 7 | Rekomendasi | |
| | | Komponen 8 | Sosialisasi hasil penelitian | |
| | | Anggaran Suboutput 1 | Rp.103.891.000,-(Seratus Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) | |
| | | | Riset identifikasi genotip HIV1 pada orang dengan HIV-AIDS di Kalimantan | |
| | | Tujuan Suboutput 2 | | |
| | | Komponen 1 | AAAAAAA | |
| | Komponen 2 | BBBBBBB | | |
| | Komponen 3 | CCCCCC | | |
| | Anggaran Suboutput 2 | Rp. | | |
| Alokasi Anggaran Output kegiatan | | (Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output kegiatan) | | |
| Dampak/hasil Output Kegiatan | | Tersedianya data proporsi nyeri pinggang pada paramedis laki-laki dan perempuan Tersedianya penyebab nyeri pinggang pada paramedic laki2 dan perempuan. | | |



KETIGA

Dalam rangka **penelaahan RKA-KL**, berkenaan dengan Anggaran Responsif Gender (ARG), Direktorat Jendral Anggaran, melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meneliti relevansi dan konsistensi dokumen Gender Budget Statement (GBS) dengan TOR, meliputi :
 - a. Suatu ARG berada pada output suatu kegiatan;
 - b. Isu kesenjangan gender dan gambaran perbaikannya tercermin dari uraian analisis situasi yang ada dalam GBS maupun isu gender dalam Kerangka Acuan Kegiatan (TOR).
 - c. Meneliti Kesesuaian GBS dengan format baku.
 - d. Apabila TOR dan GBS tidak sinkron, maka output dimaksud belum dapat dikatakan responsif gender dan perlu dilakukan perbaikan TOR supaya sinkron dengan GBS-nya.
 - e. Apabila telah sesuai dengan kaidah ARG, petugas penelaah DJA memberikan kode (atribut berupa tanda √) pada Sistem Aplikasi RKA-KL bahwa output kegiatan dimaksud telah responsif gender.
1. Untuk mempermudah proses penelaahan RKA-KL, petugas penelaah Ditjen Anggaran dapat membuat daftar (check list) atas pernyataan/pertanyaan sebagai berikut :
 - a. Apa jenis kegiatan ARG yang akan dilaksanakan? Jenis kegiatan tersebut berupa *service delivery* atau *capacity building* dan advokasi gender dalam kerangka penugasan prioritas pembangunan nasional.
 - b. Apakah telah tersedia dokumen GBS yang didahului dengan analisa gender.
 - c. Adanya isu gender yang dituangkan dalam TOR seperti :
 - i. Apakah pada bagian Latar Belakang telah dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
 - ii. Apakah tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
 - iii. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan telah menjelaskan keterlibatan atau konsultasi dengan kelompok sasaran laki-laki dan perempuan.

E. SIAPA YANG MENERJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER?

Perencana memasukkan informasi kinerja, serta rencana kegiatan dan alokasi pendanaannya dalam rangka menghasilkan outputnya, sebagai tahapan akhir dari proses penyusunan RKA-K/L dalam memasukkan data dan komponen input pada fasilitas kertas kerja di aplikasi RKA-K/L. Informasi kinerja didapat dari dokumen-dokumen seperti: Renstra, RKP dan Renja-K/L.

RKA-K/L ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I sebagai penanggung-jawab.



RKA K/L disampaikan kepada Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran dengan dilampiri:

- a. TOR dan RAB untuk setiap Output Kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab Kegiatan atau pejabat lain yang berwenang;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apabila rincian biaya yang tercantum dalam KK RKA-KL tidak terdapat dalam Standar Biaya.
- c. Arsip data komputer (ADK) RKA-KL dan KK RKA-KL Satker;
- d. Hasil kesepakatan dengan DPR;
- e. Daftar alokasi Pagu masing-masing Unit Eselon I yang dirinci berdasarkan Program, Satker dan Sumber Pendanaan;
- f. **Gender Budget Statement (GBS) apabila berkenaan dengan ARG. Penyusunan GBS mengacu pada format dan contoh di bawah;**
- g. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU (RBA BLU) apabila berkenaan dengan Satuan Kerja BLU.



CONTOH ALUR ANALISIS GENDER

Bagian ini menjelaskan bagaimana tahapan penyusunan perencanaan kebijakan program, kegiatan/sub kegiatan dan penganggaran yang responsif gender. Langkah awal yang harus dilakukan setiap K/L adalah membuat program dan kegiatan/subkegiatan yang direncanakan mampu mengecilkan isu kesenjangan gender, dan melakukan analisis gender/analisis situasi.

A. ALUR MENYUSUN PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER

Dalam melakukan penyusunan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan/subkegiatan yang responsif gender dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langkah 1 | Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada |
| Langkah 2 | Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif atau kuantitatif). |
| Langkah 3 | Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat |
| Langkah 4 | Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender. |
| Langkah 5 | Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan. |
| Langkah 6 | Reformulasikan tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan menjadi responsif gender |
| Langkah 7 | Susun rencana aksi dan sarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/subkegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender. |
| Langkah 8 | Tetapkan <i>base-line</i> |
| Langkah 9 | Tetapkan indikator gender |

Langkah-langkah yang diuraikan diatas dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi isu kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan.



Sebagai contoh analisis gender bidang pembangunan yaitu pada **Direktorat Jenderal Cipta Karya**, berikut ini:

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langkah 1 | <p>Dalam kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pemukiman di Kawasan Kumuh masih ada perbedaan akses informasi antara perempuan dan laki-laki. Umumnya laki-laki memiliki akses informasi yang cukup terkait kegiatan penyediaan infrastruktur pemukiman kumuh. Selain itu laki-laki memiliki peluang tinggi untuk berinteraksi dengan banyak pihak di luar rumah dan lingkungan pemukiman. Sementara perempuan sangat terbatas pada lingkungan rumah. Dengan perbedaan akses dan pemahaman menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam penyusunan rencana untuk penyediaan infrastruktur pemukiman, fakta membuktikan bahwa partisipasi perempuan masih kurang dari 30 %.</p> |
| Langkah 2 | <p>Isu gender yang disebabkan oleh faktor internal adalah:</p> <p>Juklak/Juknis telah menyertakan partisipasi perempuan dan laki-laki, namun hanya partisipasi jumlah (partisipasi nominal) belum ada indikator tingkat partisipasi aktif.</p> <p>Dalam internalisasi kegiatannya kurang menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat (lebih pada tahapan dan hasil), selain itu penetapan sasaran lebih difokuskan pada perwakilan/ tokoh kelompok dalam masyarakat (kurang menjangkau masyarakat sasaran secara luas).</p> |
| Langkah 3 | <p>Isu gender yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah:</p> <p>Masih adanya perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga dan masyarakat. Misalnya, untuk berpartisipasi dalam berbagai pertemuan, perempuan harus mendapatkan ijin suami, sementara laki-laki hanya memutuskan sendiri untuk berpartisipasi dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang terkait pembangunan infrastruktur.</p> <p>Masih adanya perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan terhadap letak dan pola penggunaan fasilitas pemukiman, hal ini terkait dengan pembagian peran (perempuan melakukan tugas pemeliharaan/perawatan keluarga dan laki-laki umumnya melakukan tugas pencarian nafkah utama bagi keluarga).</p> <p>Lingkungan pemukiman yang kumuh sangat rawan terhadap berbagai penyebaran dan penularan penyakit. Pada wilayah perkotaan yang kumuh disadari bahwa kualitas air dan udara sangat buruk, sehingga dengan mudah menyebabkan penularan penyakit terhadap anak-anak dan perempuan.</p> <p>50 % Perempuan yang tinggal di wilayah kumuh, belum memiliki akses terhadap air bersih, biaya untuk mendapatkan air bersih mahal, selain itu perempuan harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk memperoleh air bersih.</p> <p>Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, misalnya baik perempuan dan laki-laki sering membuang sampah di lingkungan rumah secara sembarangan. Kondisi ini mempengaruhi kesehatan lingkungan, selain itu perempuan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tetap tinggal dirumah.</p> |
| Langkah 4 | <p>Untuk mengatasi isu kesenjangan gender perlu disusun rencana aksi. Rencana yang diusulkan untuk menjawab permasalahan. Nama kegiatan yang direncanakan adalah: Penyediaan infrastruktur pemukiman di kawasan kumuh perkotaan. Adapun rincian kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana aksi yang responsif gender tersebut meliputi:</p> <p>Sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini harus memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan informasi mengenai rencana penataan lingkungan,</p> <p>Identifikasi kebutuhan. Melakukan identifikasi kebutuhan yang memastikan laki-laki dan perempuan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai rencana penataan lingkungan pada pemukiman kumuh perkotaan.</p> <p>Perancangan (kawasan dan fisik). Kegiatan ini harus memastikan bahwa aspirasi masyarakat baik perempuan dan laki-laki dapat terwujud dalam perancangan atau pembuatan desain.</p> <p>Pembangunan fisik. Harus dipastikan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk menentukan rencana pembangunan fisik yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan laki-laki sebagai penerima manfaat pembangunan.</p> |

Pada tahap ini dilakukan telaah program yang dipilih, termasuk mengidentifikasi isu gender, mengetahui



penyebab terjadinya kesenjangan gender, merumuskan ulang tujuan, menawarkan alternatif solusi berupa rencana aksi, dan menentukan indikator gender sebagai alat ukur.

Alat analisis gender yang dipilih adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP), yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Adapun langkah-langkah melakukan GAP adalah sebagai berikut:

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | | | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | | Pengukuran Hasil | |
| | | Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender |
| Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan | Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin : -kuantitatif -kualitatif | Temukenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat | Temukenali isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender | Temukenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan | Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender | Tetapkan rencana aksi yang responsif gender | Tetapkan base-line | Tetapkan indikator gender |

B. LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsif gender dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: (1) Tahap analisis situasi; (2) Tahap penyusunan kegiatan/subkegiatan; (3) Tahap penyusunan indikator kinerja

1. TAHAP ANALISIS SITUASI

Analisis situasi dalam perspektif gender merupakan analisis terhadap suatu keadaan yang terkait dengan intervensi program/kegiatan/sub-kegiatan pembangunan dan menjadi tujuan dan sasaran untuk dicapai. Analisis situasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:



| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langkah 1 | Menyajikan data terpilah sebagai pembuka mata adanya kesenjangan gender; |
| Langkah 2 | Menuliskan isu kesenjangan gender di internal dan eksternal lembaga; |
| Langkah 3 | Melakukan identifikasi isu kesenjangan gender dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan; |
| Langkah 4 | <p>Menuliskan kembali kesenjangan gender hasil identifikasi yang masuk ke dalam latar belakang kerangka acuan kegiatan.</p> <p>Contoh: Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa masih ditemukan perbedaan akses informasi antara perempuan dan laki-laki. Umumnya laki-laki memiliki akses informasi yang cukup terkait dengan kegiatan penyediaan infrastruktur pemukiman kumuh di perkotaan. Kondisi ini telah memberi peluang tinggi bagi laki-laki untuk berinteraksi dengan banyak pihak di luar rumah dan lingkungan pemukiman, sementara perempuan sangat terbatas. Kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan gender disini adalah pada perbedaan akses dan pemahaman, Juga ditemukan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam penyusunan rencana untuk penyediaan infrastruktur pemukiman, fakta membuktikan bahwa partisipasi perempuan masih kurang dari 30 %. Selain itu, masih adanya perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik dalam rumah tangga dan masyarakat. Misalnya, untuk berpartisipasi dalam berbagai pertemuan, perempuan harus mendapatkan ijin suami, sementara laki-laki memutuskan sendiri untuk berpartisipasi terhadap pembangunan infrastruktur. Lingkungan pemukiman yang kumuh sangat rawan terhadap berbagai penyebaran dan penularan penyakit. Hal lain yang belum disadari oleh masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh adalah mengenai kualitas air dan udara yang sangat buruk, sehingga dengan mudah terjadi penyebaran dan penularan penyakit terutama terhadap anak-anak dan perempuan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan terlihat dari perilaku masyarakat baik perempuan dan laki-laki yang sering membuang sampah secara sembarangan. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi kesehatan lingkungan.</p> |
| Langkah 5 | <p>Rumuskan KAK/TOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuliskan kesenjangan gender hasil identifikasi yang masuk ke dalam latar belakang kerangka acuan kegiatan (KAK-TOR) yang sedang dibangun. • Uraikan mengapa terjadi kesenjangan gender • Uraikan kesenjangan gender pada KAK/TOR <p>Tuliskan tujuan yang menggambarkan penurunan kesenjangan gender</p> <p>CONTOH :</p> <p>KERANGKA ACUAN KERJA¹ Penyediaan infrastruktur pemukiman di kawasan kumuh perkotaan</p> <p>Latar Belakang Meningkatnya pertumbuhan penduduk di kawasan pemukiman mengakibatkan kawasan pemukiman perkotaan tersebut menjadi kumuh dan tidak sehat bagi penduduk. Umumnya kawasan pemukiman di kota-kota tidak terencana dengan baik dan memiliki luas kawasan pemukiman yang terbatas. Kondisi keberadaan kawasan pemukiman di Kota-kota semakin hari semakin tidak terpelihara dan terkesan kumuh, hal ini telah menarik perhatian pemerintah terutama pemerintah pusat. Dan semakin dirasakan perlunya Perencanaan Peremajaan kawasan-kawasan kumuh secara matang, agar kawasan pemukiman kumuh dapat menjadi kawasan yang nyaman dan sehat untuk dihuni. Pemukiman Kumuh bertendensi kurang menguntungkan bagi tiap kota, maka perlu dihilangkan dan menjadi cita-cita setiap pemda. Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia menyadari untuk segera mengatasi kawasan pemukiman kumuh di kota-kota. Ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya penanganan kawasan pemukiman kumuh menjadi pertimbangan khusus dalam menghindari terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di perkotaan.</p> |



Kawasan kumuh di perkotaan yang dicirikan dengan kepadatan bangunan tinggi dan minimnya sarana dan prasarana dasar menimbulkan permasalahan antara lain rawan terhadap penyebaran dan penularan penyakit; akses terhadap air bersih yang mahal, sulit, tidak efisien, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di lingkungan rumah secara sembarangan. Permasalahan-permasalahan tersebut dialami oleh penghuni kawasan kumuh, akan tetapi sebagian besar para ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan kumuh mempunyai kebutuhan dan pengalaman tersendiri yang perlu diakomodasi. Selain itu para ibu rumah tangga ini sejatinya juga menjadi subjek yang berpartisipasi aktif dalam peremajaan kawasan tempat tinggalnya. Namun kegiatan peremajaan kawasan kumuh belum mengikutsertakan perempuan secara aktif.

Tahapan kegiatan penyusunan rencana yang ditempuh untuk mewujudkan peremajaan kawasan kumuh akan melibatkan banyak dialog dengan warga setempat, termasuk perempuan dan para ibu rumah tangga. Pada tahapan tersebut, pertimbangan yang responsif gender ditekankan pada tahap sosialisasi, identifikasi kebutuhan, perancangan kawasan. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka perlu dilakukan penanganan kawasan-kawasan pemukiman kumuh tersebut melalui fasilitas prasarana dan sarana pemukiman yang telah mempertimbangkan kebutuhan kaum perempuan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Untuk membantu Pemerintah Daerah membuat perencanaan peremajaan kawasan kumuh kota dan terciptanya kawasan pemukiman yang nyaman dan sehat.
- Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pada kawasan pemukiman yang teratur, nyaman dan sehat, sehingga masyarakat bebas dari berbagai penyakit menular.

2. TAHAP PENYUSUNAN KEGIATAN/SUB-KEGIATAN

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Langkah 1</p> | <p>Tuliskan kegiatan/sub-kegiatan</p> <p>Tuliskan nama rencana kegiatan/sub kegiatan. Sedapat mungkin kegiatannya sudah responsif gender.</p> <p>Tuliskan nama group akun (tahapan kegiatan/sub kegiatan) yang diharapkan untuk mengatasi kesenjangan gender.</p> <hr/> <p>Contoh:</p> <p>Hasil analisis situasi menggambarkan adanya perbedaan akses informasi antara perempuan dan laki-laki. Akses informasi bagi laki-laki sangat cukup dibandingkan dengan perempuan terkait dengan penyediaan infrastruktur pemukiman kumuh di perkotaan. Dengan hasil analisis situasi, maka rencana kegiatan yang diusulkan untuk mengatasi kesenjangan gender adalah dengan Nama kegiatan: Penyediaan infrastruktur pemukiman di kawasan kumuh perkotaan dan rincian group akun. Dan yang menjadi tahapan kegiatan adalah:</p> <p>Sosialisasi</p> <p>Identifikasi kebutuhan</p> <p>Perancangan (kawasan dan fisik)</p> <p>Pembangunan fisik</p> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



3. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Langkah 1</p> | <p>Menuliskan jumlah input yang digunakan</p> <p>Tuliskan jumlah anggaran kegiatan</p> <p>Tuliskan jumlah masukan grup akun yang meliputi manusia laki-laki dan perempuan, material yang akan digunakan, jumlah biaya, sasaran dll.</p> <p>Lakukan perhitungan Rencana Anggaran Belanja (RAB)</p> <p>Lakukan analisis situasi/analisis gender, apakah alokasi anggaran kegiatan yang responsif gender wajar dan rasional.</p> <p>Lakukan analisis situasi/analisis gender, apakah alokasi anggaran kegiatan/subkegiatan sesuai standar biaya umum dan khusus (apakah sesuai aturan yang berlaku)</p> |
| | <p>Contoh:</p> <p>Jumlah anggaran sangat tergantung pada hasil pembahasan antara DPR dengan mitra dari unit kerja/Satminkal. Misalkan alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp 500.000.000. Jumlah alokasi anggaran ini sudah dianalisis, wajar dan rasional sesuai dengan aturan yang berlaku, selain itu dilakukan perhitungan dan analisis anggaran belanja.</p> <p>Akun yang ditetapkan untuk mendukung kegiatan adalah (1) Pendampingan penyusunan rencana tindak penanganan kawasan pemukiman kumuh perkotaan di Kab/Kota, (2) Identifikasi kebutuhan melalui diskusi terarah (FGD), (3) Sosialisasi, (4) Perancangan (kawasan dan fisik, dan pembangunan fisik. Masukan terdiri dari jumlah perempuan yang hadir dalam pertemuan, aspirasi dari perempuan yang terakomodir dalam penyediaan infrastruktur pemukiman kumuh dan jumlah organisasi kemasyarakatan.</p> |
| <p>Langkah 2</p> | <p>Menuliskan indikator keluaran (<i>output</i>) kegiatan/subkegiatan</p> <p>Tuliskan indikator keluaran (<i>output</i>) kegiatan/sub kegiatan yang menggambarkan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif. Indikator kinerja keluaran merupakan ukuran keberhasilan kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Satminkal</p> <p>Lakukan analisis situasi/ analisis gender, apakah alokasi sumber daya berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan kegiatan/subkegiatan yang responsif gender.</p> <p>Contoh indikator keluaran (<i>output</i>):</p> <p>Partisipasi perempuan dalam pertemuan untuk membahas penyediaan infrastruktur ada sekitar 35 %, perempuan dapat berinteraksi dengan lingkungan dan tidak terbatas pada lingkungan keluarga.</p> <p>Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan infrastruktur pemukiman kumuh perkotaan.</p> <p>Perempuan memiliki akses yang mudah terhadap air bersih pada wilayah pemukiman kumuh, sehingga perempuan tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengakses air bersih.</p> |
| <p>Langkah 3</p> | <p>Menuliskan indikator hasil (<i>outcome</i>) kegiatan/sub kegiatan</p> <p>Tuliskan indikator hasil suatu kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender. Indikator hasil (<i>outcome</i>) haruslah dikaitkan dengan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau yang menjadi efek langsung mengenai perubahan kondisi perempuan dan laki-laki.</p> <p>Tuliskan indikator hasil (<i>outcome</i>) yang realistis sesuai rumusan tujuan kegiatan/sub kegiatan.</p> <p>Tuliskan indikator manfaat (dampak).</p> <p>Tentukan siapa target penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan/subkegiatan.</p> <p>Tuliskan perkiraan dampak dari pelaksanaan kegiatan/subkegiatan</p> |



10. Rencana Aksi

- a. Sub-Output (*Bagian dari suatu Output. Suboutput ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisa situasi*)
 - i. Tujuan sub-output (*Uraian mengenai tujuan adanya suboutput setelah dilaksanakan analisis gender. Jika penyusun GBS menggunakan analisis Gender Analysis Pathway (GAP) maka, dapat menggunakan hasil jawaban kolom 6 (enam) pada Format GAP*)
 - ii. Komponen 1 (*Uraian mengenai tahapan pelaksanaan suboutput*)
 - iii. Komponen 2 (*Uraian mengenai tahapan pelaksanaan suboutput*)
 - iv. Komponen 3 (*Uraian mengenai tahapan pelaksanaan suboutput*)
 - v. Anggaran sub-Output 1 (Rp.)
- a. Suboutput 2
 - ii. Tujuan sub-output
 - iii. Komponen 1
 - iv. Komponen 2
 - v. Komponen 3
 - vi. Anggaran sub-Output 1
7. Alokasi Anggaran Output kegiatan (Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output kegiatan)
8. Dampak/hasil Output Kegiatan (Dampak/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi)

CONTOH-CONTOH: GENDER BUDGET STATEMENT HASIL UJI-COBA DARI 7 (TUJUH) K/L sesuai Permenkeu No. 119/PMK-02/2009 dapat disimak pada Daftar Lampiran-Lampiran



PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan penganggaran di semua bidang pembangunan yang dananya bersumber dari APBN, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006.

Dalam peraturan tersebut diatur bahwa proses pemantauan dan evaluasi dilaksanakan tidak hanya mengikat Satuan Kerja (Satker), akan tetapi juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan).

Pemantauan didefinisikan sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Ruang lingkup yang dipantau meliputi: (1) program/kegiatan/sub-kegiatan yang tertera pada Rencana Kerja (Renja) KL yang mendapatkan anggaran (DIPA), (2) program/kegiatan/sub-kegiatan di tingkat Provinsi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, dan atau Tugas Pembantuan dan (3) program/kegiatan/sub-kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan.

Evaluasi kegiatan pengintegrasian isu gender dalam pelaksanaan dan penganggaran di bidang pembangunan dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran sumber daya yang digunakan, serta indikator dan sasaran kinerja keluaran (*output*) untuk masing-masing kegiatan. Hasil evaluasi akan digunakan oleh para pengambil kebijakan di setiap K/L untuk menilai pelaksanaan kegiatan evaluasi pencapaian indikator dan sasaran hasil (*outcome*). Prinsip dari evaluasi adalah: terencana, relevan, objektif, dapat dibuktikan, bersifat kesinambungan, spesifik dan layak.

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi para pelaksana harus sudah memahami isu gender serta dilengkapi dengan instrumen khusus yang dapat secara tepat menemukan adanya kesenjangan gender, dan dapat memperlihatkan capaian perencanaan dan penganggaran yang menurunkan atau menghapuskan kesenjangan gender.

B. RUANG LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yaitu: 1). Kerangka Acuan Kegiatan; 2). Rencana Kerja Anggaran; 3). Dokumen Gender Budget Statement (GBS).

C. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender adalah suatu besaran atau ukuran yang dapat menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya peluang yang dimiliki penerima manfaat untuk bekerja dan terlibat dan berpartisipasi, serta aktif dalam pengambilan keputusan, seperti: (1) jumlah penerima manfaat menurut jenis kelamin yang ikut menjadi penanggung jawab atau pelaksana dalam program dan kegiatan pembangunan, (2) aktivitas usaha menurut jenis kelamin sudah tercatat dalam data profile desa sebagai bagian dari potensi atau SDM desa yang berkaitan dengan jenis program dan kegiatan pembangunan.
2. Lebih terbukanya akses bagi semua penerima manfaat terhadap sumber daya (teknologi, informasi, pasar, kredit, modal kerja), seperti : (1) wadah informasi yang mudah dan dapat diakses oleh penerima manfaat (laki-laki/perempuan) secara adil berkaitan dengan program dan kegiatan pembangunan, (2) kebijakan atau peraturan yang memudahkan penerima manfaat (laki-laki/perempuan) untuk memperoleh kesempatan/peluang dalam mengakses modal usaha, kesempatan kerja, partisipasi, dan keterlibatan pengambilan keputusan dalam program dan kegiatan pembangunan
3. Besarnya manfaat yang dinikmati oleh penerima manfaat dalam pembangunan/program/kegiatan/sub-kegiatan, seperti: (1) adanya perubahan status perempuan dan laki-laki dari kondisi marginal menjadi kelompok yang diperhitungkan dalam segala aspek program dan kegiatan pembangunan, (2) partisipasi perempuan di berbagai bidang dalam pembangunan pertanian, (3) perubahan pembagian peran terhadap sumber daya baik dalam lingkup keluarga, komunitas dan masyarakat dalam mengakses, berpartisipasi pengambilan keputusan dan manfaat dari program dan kegiatan pembangunan.
4. Tidak adanya kebijakan yang diskriminatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Ukurannya :
 - a. Berkurangnya pertengkaran atau perselisihan di masyarakat khususnya laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh ketidakadilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
 - b. Berkurangnya kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki, antara kaya dan miskin atau kelas-kelas lainnya di masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.



5. Ada data terpilah (data gender di semua bidang pembangunan). Ukurannya:
 - a. Ada daftar data yang terpilah menurut jenis kelamin baik kuantitatif atau kualitatif tentang aktivitas baik ekonomi, sosial dan politik berdasarkan jenis kelamin;
 - b. Ada daftar tentang masalah dan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin pada semua jenis program dan kegiatan pembangunan;
 - c. Ada daftar prioritas kebutuhan termasuk upaya-upaya peningkatan kapasitas berdasarkan jenis kelamin pada semua jenis program dan kegiatan pembangunan;
 - d. Ada peraturan khusus yang disediakan untuk mendorong partisipasi perempuan dan laki-laki secara adil berdasarkan jenis kelamin meliputi semua jenis program dan kegiatan pembangunan.
6. Tersedianya kebutuhan praktis gender yakni kebutuhan perempuan agar dapat menjalankan peran sosial yang diperankan untuk merespon kebutuhan jangka pendek. Contoh: Perbaikan taraf hidup dan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penggarapan usaha. Ukurannya :
 - a. Tersedianya fasilitas yang mudah diakses dan sesuai standar kesehatan bagi perempuan dan keluarga sehubungan dengan usaha;
 - b. Berkurangnya keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kesehatan perempuan dan keluarga yang diakibatkan proses dalam usaha.
7. Terpenuhinya 5 (lima) prasyarat pengarusutamaan gender (PUG), yakni (1) Kelembagaan; (2) Komitmen; (3) Dukungan Forum; (4) Pemampuan PUG; (5) Tersedianya Data terpilah. Untuk itu, salah satu prasyarat yang terkait dengan PPRG adalah terbentuk dan berfungsinya *Gender Focal Point*, serta terbangunnya Kelompok Kerja (Pokja) PUG di semua bidang pembangunan baik di nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota. Ukurannya:
 - a. Adanya pertemuan atau diskusi reguler tentang isu Gender baik ditingkat pengambil keputusan maupun pelaksana lapangan;
 - b. Adanya refleksi atau evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana partisipasi perempuan dan laki-laki dalam suatu kegiatan/sub-kegiatan atau pembangunan;





BAB VIII

PENUTUP

Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Generik ini adalah merupakan hasil revisi dari Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Generik sebagai penyatuan dari yang dihasilkan oleh 3 (tiga) Kelompok Kerja (Pokja) PUG pada tahun 2009. Ketiga kelompok kerja tersebut adalah Kelompok Kerja (Pokja) Data; Kelompok Kerja (Pokja) Advokasi dan Sosialisasi (Adsos); Kelompok Kerja (Pokja) Monev). Buku pedoman ini disusun oleh keanggotaan Pokja Data, Adsos dan Monev yang terdiri dari 16 Kementerian dan Lembaga (16 K/L) yaitu : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Bappenas, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, BPPT, Kementerian Sosial, BNPB.

Perencanaan Penganggaran yang responsif gender, yaitu perencanaan dan penganggaran yang dilakukan dengan memasukan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya. Dalam rangka menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender perlu dilakukan analisis gender pada semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Anggaran yang responsif gender, yaitu untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam semua bidang pembangunan.

Dalam proses perencanaan penganggaran yang responsif gender pada setiap lingkup pemerintah, perlu partisipasi perempuan dan laki-laki secara aktif dan secara bersama-sama pemerintah menetapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman, persepsi bagi para penyusun perencanaan dan penganggaran tentang "pemahaman" gender serta arti pentingnya perencanaan dan penganggaran dan mutlak diperlukan.

Mengingat bahwa kesinambungan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, maka analisis gender dalam berbagai kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG seperti lemahnya komitmen para penentu kebijakan baik di lingkungan eksekutif,



legislatif dan yudikatif, minimnya pakar analisis gender karena kurangnya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas, dan terbatasnya informasi dan data terpilah berdasar jenis kelamin, untuk itu perlu mendapat perhatian secara seksama agar pelaksanaan strategi PUG dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan di masa yang akan datang.

Buku pedoman ini dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan masing-masing Kementerian dan Lembaga (K/L).



DAFTAR PUSTAKA

1. Dr Soedarti Surbakti dan Tim, Pemetaan dan Penyempurnaan Alur Data Sektoral untuk Pemantauan Pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium Indonesia, BPS.
2. Rinusu dan Tim, Modul Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan: Teori dan Aplikasi, KNPP – UNDP, 2007
3. Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan, KNPP – Departemen Kesehatan – UNFPA, 2008
4. Panduan Penyusunan “Pengintegrasian Isu Gender ke Dalam Sistem Perencanaan & Penganggaran Pembangunan Pertanian”, Departemen Pertanian RI – KPP PA 2009
5. Panduan Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan Program dan Anggaran – Kementerian Pekerjaan Umum – KPP PA 2009
6. Bahan Workshop Penyusunan Panduan Data Terpilah dari Dit Sistem Anggaran, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, 2009. Tidak Dipublikasikan.
7. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran No. 0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/ PMK.02/ 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 104/ PMK.02/ 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2011;



ISTILAH DAN DEFINISI

Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/*difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi)⁸ untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Netral Gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dll.).

Analisis Gender. Mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan; berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender untuk analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.

Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.

Perencanaan yang Responsif Gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program sampai operasionalnya di lapangan.

⁸ Berdasarkan definisi yang diambil dari Renstra 2010-2014 Departemen PU (Versi 6)



Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Kebijakan/ Program Responsif Gender adalah kebijakan/program yang responsif gender berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.

Gender Budget adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan item-item yang berhubungan dengan perempuan. Selain dapat digunakan untuk melihat sekilas jarak antara kebijakan dan sumberdaya gender budget yang merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan berdasarkan kesetaraan gender. Isunya bukan apakah kita mengeluarkan uang yang sama pada masalah yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki tapi apakah pengeluaran itu mencukupi kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.⁹

Dua macam data terpilah menurut jenis kelamin, ada dua macam data terpilah menurut jenis kelamin dari perspektif gender: (1) data terpilah menurut jenis kelamin; (2) Gender statistik

Data terpilah menurut jenis kelamin, data/bahan keterangan dari aspek-aspek yang diamati dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Contoh: Pedagang batik di pasar A berjumlah 300 orang yang terbagi kedalam 51% perempuan dan 49% laki-laki.

Apakah data terpilah menurut jenis kelamin sudah cukup untuk melakukan analisis gender? Belum! Dari perspektif gender, data menurut jenis kelamin, belum memperlihatkan kedalaman isu gender yang tersirat. Sebab itu memerlukan informasi/ analisis lebih lanjut; hasilnya adalah gender statistik. .

Statistik Gender adalah kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang mengandung isu gender. Misalnya: Dari tigaratus pedagang batik di pasar A, seluruh pedagang laki-laki mendapatkan kredit dari bank lebih besar, dibandingkan dengan kredit yang diterima oleh pedagang perempuan. Jumlah pedagang perempuan yang mengajukan kredit lebih sedikit daripada pedagang laki-laki. Untuk mendapatkan kredit perempuan memerlukan ijin dari suami, tetapi laki-laki dapat memperoleh kredit tanpa persetujuan istri. Dalam mengembalikan kredit perempuan lebih tertib daripada laki-laki.

Statistik gender biasanya dipakai dalam konteks kebijakan. Statistik gender diperlukan untuk; (1) melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif; (2) membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender dan; (3) bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang responsif gender.

Untuk keperluan PUG dua macam data tersebut yaitu data terpilah menurut jenis kelamin dan statistik gender. Kedua macam data tersebut harus tersedia secara reguler dan diperbaharui ('updated').

Sumber: Biro Perencanaan dan KLN Departemen Pekerjaan Umum, 2009

⁹ Definisi berdasarkan masukan dari Sekretariat PUG Departemen Pekerjaan Umum (Nopember 2009).



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Permenkeu No. 119/PMK.02/2009

1. GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Kementerian Pertanian
Unit Organisasi : Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAM (04.03.04) | | PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN |
| KEGIATAN (1518) | | Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian |
| | SUB KEGIATAN (02392) | Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan |
| ANALISA SITUASI | | <p>Untuk mempertahankan swasembada beras maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyempurnaan penanganan pasca panen padi. Penanganan pasca panen merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dengan melalui penurunan losses secara bertahap. Secara implisit bahwa penanganan pasca panen padi dibutuhkan tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan yang relatif banyak. Dengan banyaknya kebutuhan tenaga kerja tersebut dapat digolongkan sebagai tenaga kerja terampil lepas musiman. Pola pemanfaatan tenaga kerja pada penanganan pasca panen padi, jagung dan STA dapat diidentifikasi adanya persoalan gender yaitu :</p> <p>Tenaga kerja panen pada berbagai tahapan penanganan pasca panen yang sebenarnya dapat dilakukan oleh perempuan, pada umumnya masih ditangani oleh laki-laki dengan ratio laki-laki 70% dan perempuan 30%. Ada kecenderungan perempuan termajinalisasi dibandingkan laki-laki.</p> <p>Tenaga operator alat sistem pertanian pasca panen masih didesign untuk dioperasikan oleh laki-laki dibanding dengan perempuan dengan rasio 90% laki-laki dan 10% perempuan. Apabila ada alat yang didesign untuk dioperasikan perempuan peluang keikutsertaan perempuan akan lebih banyak.</p> <p>Pelaku usaha penggilingan padi didominasi oleh laki-laki disebabkan sifat pekerjaannya dengan rasio 70% laki-laki dan 30% perempuan.</p> <p>Pelaku pemasaran hasil lebih banyak perempuan dibanding dengan laki-laki dengan rasio 30% laki-laki dan 70% perempuan</p> <p>Dari adanya kesenjangan gender tersebut di atas maka dilakukan kegiatan pelatihan dan pertemuan penanganan pasca panen yang diharapkan diikuti oleh peserta perempuan 60% dan 40% laki-laki.</p> <p>Kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan ini adalah (1) Akselerasi GP4GB (Gerakan Penanganan Pasca Panen & Pemasaran Gabah/Beras) mendukung P2BN Peningkatan Produksi Beras Nasional) di Kab Bojonegoro, Jombang, Tuban, Lamongan; (2) Pengembangan Pengerian dan Penyimpanan Jagung Melalui Pemuda Membangun Desa (PMD) di Kab Lamongan dan Bojonegoro dan (3) Optimalisasi pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kota Surabaya</p> |
| KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN | | Bimbingan teknis penanganan pasca padi, jagung dan sub terminal agribisnis |
| | GRUP AKUN (A) – (D) | Akselerasi GP4GB mendukung P2BN di Kab Bojonegoro, Jombang, Tuban, Lamongan |



| | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | INDIKATOR INPUT | Jumlah peserta pelatihan sebanyak 60 orang per kabupaten yang diharapkan pesertanya 60% perempuan dan 40 % laki-laki; Tenaga pelatih dalam penanganan pasca panen diharapkan lebih banyak perempuan sesuai dengan keahliannya Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan yang dapat meningkatkan peran perempuan dalam penanganan pasca panen padi. |
| | INDIKATOR OUTPUT | Tersedianya satu tenaga pendamping laki-laki atau perempuan di kabupaten untuk mendampingi GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dalam mendukung program GP4GB; Terlatihnya 240 orang anggota kelompok tani sebanyak 40% laki-laki dan 60% perempuan; |
| | GRUP AKUN (E) – (F) | Pengembangan Pengerih dan Penyimpanan Jagung Melalui Pemuda Membangun Desa (PMD) di Kab Lamongan dan Bojonegoro |
| | INDIKATOR INPUT | Jumlah peserta pelatihan sebanyak 60 orang per kabupaten yang diharapkan pesertanya 60% perempuan dan 40 % laki-laki; Tenaga pelatih dalam penanganan pasca panen diharapkan lebih banyak perempuan dan sesuai dengan keahliannya Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan yang dapat meningkatkan peran perempuan dalam penanganan pasca panen jagung. |
| | INDIKATOR OUTPUT | Tersedianya satu tenaga pendamping laki-laki atau perempuan di kabupaten untuk mendampingi GAPOKTAN dalam mendukung program pengerih dan penyimpanan jagung; Terlatihnya 120 orang anggota kelompok tani sebanyak 40% laki-laki dan 60% perempuan; |
| | GRUP AKUN (G) | Optimalisasi Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kota Surabaya |
| | INDIKATOR INPUT | Jumlah peserta pelatihan sebanyak 90 orang di STA yang diharapkan pesertanya 60% perempuan dan 40 % laki-laki; Tenaga pelatih dalam penanganan pasca panen diharapkan lebih banyak perempuan sesuai dengan keahliannya Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan yang dapat meningkatkan peran perempuan dalam penanganan pasca panen di STA. |
| | INDIKATOR OUTPUT | Tersedianya satu tenaga pendamping laki-laki atau perempuan di STA Terlatihnya 90 orang anggota kelompok tani baik laki-laki dan perempuan |
| ANGGARAN SUB KEGIATAN | | Rp. 3.500.000.000.000 (tiga milyar lima ratus juta) |
| INDIKATOR OUTCOME ATAU DAMPAK / HASIL SECARA LUAS | | Meningkatnya pengetahuan petani laki-laki dan perempuan dalam penanganan panen, komoditas padi, jagung dan kegiatan STA. Meningkatnya peran perempuan sebesar 10% dari sebelumnya yang ikut dalam penanganan pasca panen padi, jagung dan STA sehingga perempuan lebih banyak dilibatkan. Diharapkan dapat menurunkan kehilangan hasil padi sampai 1% – 1,5% |



2. GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Kementerian Pekerjaan Umum
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

| | | |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program | | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku |
| Kegiatan | | Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Air Baku |
| | Sub kegiatan | Pembangunan Jaringan Air Baku |
| Analisis Situasi | | Masyarakat Indonesia baik di pedesaan dan di perkotaan mengandalkan sumber air secara langsung untuk memenuhi kebutuhan air, yaitu: air permukaan, air tanah dan air hujan. Ketersediaan sumber-sumber air tersebut dipengaruhi siklus air sesuai dengan musim, berlimpah di musim penghujan dan berkurang di musim kemarau. Berkurangnya bahkan mengeringnya air dapat menyengsarakan masyarakat tersebut, baik perempuan maupun laki-laki. Kegiatan-kegiatan domestik tersebut yang terdiri dari memasak, mencuci dan lain-lain lebih dominan dilakukan oleh satu golongan gender tertentu yang dalam hal ini adalah perempuan, sehingga berkurangnya ketersediaan air tersebut sangat berdampak pada satu golongan tersebut. Pemerintah melalui Ditjen SDA, Kementerian PU mempunyai tugas dalam pemenuhan air baku dan dilaksanakan dalam Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Agar program ini dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara adil dan seimbang, maka perlu dipertimbangkan keseimbangan gender terutama bagi penerima dampak langsung. |
| Kegiatan yang direncanakan | | Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Air Baku di Wilayah Sungai.... |
| | Group Akun | Pembangunan Prasarana Pengambilan Air Baku : Perlu nya keseimbangan gender dalam pemanfaat air pada lokasi pembangunan secara adil dan proporsional dalam memberi masukan perencanaan pembangunan. Perlu nya pemilahan item pekerjaan yang dapat dilakukan oleh perempuan dan partisipasinya dalam pelaksanaan konstruksi. Perlu nya kepastian fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara mudah dan nyaman untuk perempuan dan laki-laki. |
| | Indikator Input | Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan seimbang, adil dan proposional oleh perempuan dan laki-laki. |
| Anggaran sub kegiatan | | Rp 1.500.000.000,- |
| Output | | Terselenggaranya Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Air Baku di Wilayah Sungai 9 yang mempertimbangkan kesimbangan gender |
| Indikator Outcome atau dampak / hasil secara luas | | Terpenuhinya kebutuhan air baku pada suatu lokasi secara menerus dan menjamin keseimbangan gender. Terjadinya keseimbangan gender dalam melaksanakan kegiatan domestik. Terciptanya keseimbangan gender dalam pelaksanaan konstruksi. |



3. GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Kementerian Pekerjaan Umum
 Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

| | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program | | Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya |
| Kegiatan | | Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya |
| | Subkegiatan | Pemantauan Kualitas Air |
| Analisis Situasi | | <p>Sungai di Indonesia umumnya digunakan langsung oleh masyarakat baik sebagai air baku, mandi dan mencuci. Disisi lain sungai juga digunakan sebagai drainasi air hujan (strom water) juga air limbah (waste water). Peningkatan kegiatan domestik maupun industri pada suatu daerah aliran sungai (DAS) menyebabkan meningkatnya pencemaran pada air sungai. Penerima dampak secara langsung akibat pencemaran air sungai dengan berbagai penyakit sebagian besar adalah satu golongan gender tertentu yang dalam hal ini adalah perempuan, dimana umumnya kegiatan domestik dilakukan oleh perempuan. Kegiatan pemantauan kualitas air adalah kegiatan wajib yang tiap tahun anggaran dilakukan oleh Balai/Balai Besar Wilayah Sungai..... Kegiatan yang terdiri dari rencana pemanfaatan air, pemantauan kualitas air, penetapan baku mutu air, penetapan daya tampung, penetapan mekanisme perijinan pembuangan air limbah serta pembinaan dan pengawasan perlu mempertimbangkan keseimbangan gender penerima dampak langsung, yaitu :</p> <p>Kurang seimbang akses informasi antara perempuan dan laki-laki terhadap penetapan dasar mutu air dan informasi kualitas air pada suatu sungai berdampak pada pemanfaat air sungai tersebut, baik terhadap aktifitas domestik maupun kesehatan. Dimana pemanfaat air sungai terbesar adalah satu golongan gender tertentu.</p> <p>Kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pemantauan kualitas air disebabkan oleh anggapan perempuan tidak terampil dalam melakukan pekerjaan lapangan, dalam hal ini pengambilan sampel di sungai. Namun demikian kesenjangan juga terjadi dalam pengolahan data, dimana umumnya pekerjaan laboratorium dilakukan oleh perempuan.</p> <p>Dari segi manfaat tidak ada kesenjangan dalam pemanfaatan data hasil pemantauan kualitas air ini. Karena baik perempuan maupun laki-laki sepanjang sungai sama-sama kurang mengetahui data kualitas air sungai yang secara rutin dimanfaatkan. Namun demikian, tidak termanfaatkannya data kualitas air sungai ini dapat berdampak pada kesehatan pemanfaat air yang lebih dominan pada satu golongan gender tertentu yang dalam hal ini adalah perempuan.</p> <p>Kegiatan pengawasan pemanfaatan sungai terutama sebagai drainase air limbah umumnya tidak mempertimbangkan keseimbangan gender. Penetapan baku mutu air limbah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan gender, dimana pada saat ini hanya satu golongan gender tertentu sebagai pemanfaat terbesar air sungai.</p> |
| Kegiatan yang direncanakan | | Pemantauan Kualitas Air di Sungai..... |
| | Group Akun | Operasional Pemantauan Kualitas Air: |
| | Indikator Input | Pada lokasi-lokasi pengambilan sampel sepanjang sungai yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki secara adil, seimbang dan proposional serta sosialisasi dihadiri oleh perempuan dan laki-laki |
| Anggaran sub kegiatan | | Rp 400.000.000,- |



| | | |
|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Output | | Terselenggaranya pemantauan kualitas air di Wilayah Sungai..... dengan mempertimbangkan keseimbangan gender |
| Indikator Outcome atau dampak / hasil secara luas | | <p>Tersedianya data kualitas air pada suatu sungai secara lengkap dan menerus yang menjamin keseimbangan gender.</p> <p>Meningkatnya kualitas air sehingga dapat termanfaatkannya air secara adil, seimbang dan proporsional untuk semua golongan gender dengan ditandai dengan menurunnya pencemaran air.</p> <p>Menurunnya penyakit yang diderita satu golongan gender tertentu akibat pencemaran air sungai.</p> |

4. GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Kementerian Pekerjaan Umum
Unit Organisasi : Ditjen Bina Marga

| | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program | | Peningkatan/Pembangunan |
| Kegiatan | | Review NSPK yang Responsif Gender |
| | Analisis Situasi | <ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum : Amdal : Permen LH No.08/2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal UKL/PL : Kepmen LH No.86/2002 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen UKL/UPL Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan dan Fungsi Pemerintah dalam Menunjang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan dan Jembatan Komposisi kebutuhan data sosial ekonomi masih bersifat general (belum terpilah gender) Responden data survei masih belum menggambarkan informasi gender (laki-laki dan perempuan) Pada tahap sosialisasi, data peserta belum menunjukkan informasi yang menyuarakan aspirasi perempuan |
| Kegiatan yang akan direncanakan | Akun | Penyusunan manual survei pengumpulan data sosial ekonomi dokumen lingkungan bidang jalan |
| | Indikator Input 1 | Data terpilah gender sudah terakomodasi dalam Dokumen Lapangan Lingkungan dalam bentuk format kuesioner survei. |
| | Indikator Output 1 | Tersedianya data terpilah gender dalam Dokumen Lapangan Lingkungan |
| | Anggaran 1 | Rp,- |
| | Indikator Outcome 1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdukungnya program pembangunan peningkatan jalan yang berwawasan lingkungan. 2. Telah terakomodasinya aspirasi masyarakat baik laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan. |



5. GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Kementerian Pekerjaan Umum
Unit Organisasi : Ditjen Cipta Karya

| | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah |
| Kegiatan | | Pembinaan PAMSIMAS |
| Tujuan | | Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Pamsimas yang didukung oleh konsultan yang memberi bantuan teknis yang ditempatkan di Pusat dalam implementasi strategi, kebijakan, penyusunan pedoman, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program dan keberlanjutan pasca Program. |
| Sub Kegiatan | | Pembinaan Program dan Rencana Kerja |
| Analisa Situasi | | <p>Pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat merupakan permasalahan yang sudah menjadi isu nasional dengan ditandatanganinya dokumen MDG's. Guna mencapai tujuan tersebut, maka perlu suatu upaya guna menjamin keberlanjutan sarana yang akan dibangun. Salah satunya melalui program PAMSIMAS yang dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, dengan mempertimbangkan kondisi di bawah ini</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAMSIMAS telah dilaksanakan sejak TA 2008. Sarana AMPL di beberapa desa telah terbangun dan dimanfaatkan warga desa sasaran. Pemanfaatan air minum/bersih lebih dekat dengan kaum perempuan (ibu rumah tangga) dari pada kaum laki-laki. Ibu-ibu lebih sering menggunakan air untuk memasak, mencuci, merawat & memandikan bayi, dll. Sehingga perlu keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sarana AMPL. (didukung dengan data kuantitatif pengguna air perempuan dan laki-laki) Tim Fasilitator harus mampu mendorong kaum perempuan untuk maju dalam pembentukan Badan Pengelola SPAM Desa. Guna menjamin keberlanjutan sarana yang terbangun dan memperkuat potensi pengembangannya, maka diperlukan penguatan terhadap unsur Badan Pengelola SPAM Desa. - Program PAMSIMAS dilaksanakan oleh banyak implementing agency dan unsur terkait dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga "koordinasi" menjadi poin penting untuk mencapai keberhasilan program. - Sesuai dengan tujuan Program PAMSIMAS, yaitu penyediaan sarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan, maka dalam proses seleksi desa harus dilakukan pembinaan dan monitoring yang baik agar tepat sasaran. - Dalam rangka pengukuran indikator kinerja program, maka diperlukan data dasar desa sasaran PAMSIMAS sebelum adanya intervensi program, untuk itu perlu dilakukan survey untuk mendapatkan baseline data. - Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran CPMU memerlukan bantuan teknis yang akan dilakukan oleh Konsultan CMAC (operasional) dan Project Management Advisor (kebijakan). - Seperti yang disyaratkan dalam Financing Agreement PAMSIMAS, bahwa perlu dilaksanakan audit kinerja program yang akan dilakukan oleh Tim BPKP didampingi unsur pelaksana program. |
| Kegiatan yang Direncanakan | Akun 1 | Pelatihan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa |
| | Indikator Input 1 | - Terbentuknya Badan Pegelola sarana air minum dan sanitasi guna keberlanjutan sarana terbangun yang mempertimbangkan <u>kesetaraan gender</u> (minimal 30% laki-laki atau perempuan). |



| | | |
|--|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Indikator Output 1 | - Penguatan terhadap 1650 Badan Pengelola SPAM Desa yang terbentuk di tahun 2009 baik dari sisi teknis maupun keuangan |
| | Anggaran 1 | Rp. 4.500.000.000,- |
| | Akun 2 | Rakornas PAMSIMAS 2010 |
| | Indikator Input 2 | - Rumusan kemajuan program, permasalahan dan tindak lanjut serta isu-isu spesifik hasil dari Raker Regional. |
| | Indikator Output 2 | - Kesepakatan tindaklanjut program secara Nasional. |
| | Anggaran 2 | Rp. 702.650.000,- |
| | Akun 3 | Raker Regional |
| | Indikator Input 3 | - Data-data kemajuan program, permasalahan dan tindak lanjut serta isu-isu spesifik dari masing-masing Kabupaten/Kota. |
| | Indikator Output 3 | - Rumusan kemajuan program, permasalahan dan tindak lanjut serta isu-isu spesifik untuk dibahas di Rakornas PAMSIMAS. |
| | Anggaran 3 | Rp. 4.000.000.000,- |
| | Akun 4 | Roadshow |
| | Indikator Input 4 | - Daftar longlist desa sasaran PAMSIMAS |
| | Indikator Output 4 | - Shorlist desa sasaran PAMSIMAS dan SK Penetapan Bupati/Walikota |
| | Anggaran 4 | Rp. 3.500.000.000,- |
| | Akun 5 | CMAC |
| | Indikator Input 5 | Bantuan teknis pengendalian operasional program |
| | Indikator Output 5 | Terlaksananya tugas, fungsi dan peran CPMU dengan baik. |
| | Anggaran 5 | Rp. 10.000.000.000,- |
| | Akun 6 | Baseline Survey |
| | Indikator Input 6 | Termobilisasinya konsultan Baseline Survey |
| | Indikator Output 6 | Tersedianya data dasar di ... desa calon penerima program PAMSIMAS. |
| | Anggaran 6 | Rp. 5.000.000.000,- |
| | Akun 7 | Project Management Advisor |
| | Indikator Input 7 | Bantuan teknis kebijakan program |
| | Indikator Output 7 | Terlaksananya tugas, fungsi dan peran CPMU dengan baik. |
| | Anggaran 7 | Rp. 750.000.000,- |
| | Akun 8 | Audit Kinerja PAMSIMAS |
| | Indikator Input 8 | - Ditetapkannya Rumusan Indikator Kinerja PAMSIMAS - Terbentuknya Tim Audit |
| | Indikator Output 8 | Laporan Audit Indikator Kinerja |
| | Anggaran 8 | Rp. 400.000.000,- |



6. GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Kementerian Pekerjaan Umum
 Unit Organisasi : Ditjen Penataan Ruang

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program | | PENATAAN RUANG |
| Kegiatan | | PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI NORMA, STANDAR, PEDOMAN DAN MANUAL (NSPM) BIDANG PENATAAN RUANG |
| | Sub-Kegiatan | PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/ WORKSHOP/DISEMINASI/ SEMINAR/PUBLIKASI |
| Analisis Situasi | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sesuai amanah UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa salah satu tugas Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah melakukan pembinaan terkait penataan ruang kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Salah satu pembinaan yang dimaksud adalah melakukan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang bagi para stakeholders di daerah sebagai acuan penataan ruang di daerah. ■ Sudah terdapat beberapa pedoman/modul/ manual bidang penataan ruang yang disusun oleh pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Penataan Ruang, Departemen PU. ■ Namun, pedoman-pedoman yang sudah disusun tersebut belum melalui suatu proses mekanisme keadilan dan kesetaraan gender (belum mengakomodasi kepentingan gender) atau dengan kata lain produk-produk tersebut masih bersifat netral gender (melalui proses kemanfaatan bagi seluruh masyarakat tanpa melakukan proses analisis gender). ■ Walaupun pedoman-pedoman tersebut belum responsif gender dan menunggu untuk direvisi, kegiatan ini akan tetap dilaksanakan melalui proses mekanisme analisis gender dengan memasukkan materi gender ke dalam pelatihan dimaksud. Adapun pedoman yang dipandang prioritas berdasarkan amanat UUPR untuk disosialisasikan pada TA 2010 ini adalah Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota (berdasarkan Permen PU No. 15, 16, dan 17 tahun 2009). Adapun target peserta berasal dari aparat pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat khususnya perempuan. Hal ini mengingat partisipasi perempuan dalam pelatihan apresiasi teknis yang sudah berjalan selama ini masih kurang (<30% dari total peserta) padahal peran perempuan dalam penataan ruang sangat diperlukan terutama dalam peningkatan kualitas pengetahuan dan pemahaman terhadap penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Hal ini akan berimplikasi kepada kebijakan penataan ruang di daerah yang pada akhirnya akan mengakomodir kebutuhan yang sepadan baik laki-laki dan perempuan di dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah. |
| Kegiatan yang direncanakan | Akun 1 | <p>Apresiasi Teknik Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah II</p> <p>Melakukan pelatihan teknis di 2(dua) lokasi di Wilayah II (Bandung dan Surabaya) dengan peserta masing-masing lokasi berjumlah 40 orang bagi stakeholders terkait penataan ruang (aparat pemda, dunia usaha, dan masyarakat) dengan terlebih dahulu menganalisis kelompok peserta (aparat pemda, dunia usaha, dan masyarakat) yang akan diundang sebagai peserta menurut jenis kelamin</p> |



| | | |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Indikator Input 1 | Jumlah stakeholders terkait penataan ruang menurut jenis kelamin di Wilayah II yang sudah pernah mengikuti sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang; 100% target stakeholders terkait penataan ruang perempuan di kabupaten dan kota terpilih di Wilayah II ikut sebagai peserta pelatihan. |
| | Indikator Output 1 | Tersedianya data dan analisis para stakeholders terkait penataan ruang menurut jenis kelamin di kabupaten dan kota terpilih di Wilayah II; Tersosialisasinya materi dan muatan pedoman penyusunan RTRW bagi para peserta pelatihan baik laki-laki dan perempuan. |
| Anggaran Sub-Kegiatan | | Rp 800.000.000,- |
| Indikator outcome atau dampak/hasil secara luas | | Peningkatan kualitas pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan baik laki-laki dan perempuan akan muatan Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota; Meningkatnya kualitas produk rencana yang dihasilkan oleh Provinsi, Kabupaten dan Kota yang responsif gender; Kebijakan penataan ruang di daerah yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. |

1 Disadur dari contoh yang telah dibuat dari Dirjen Cipta Karya dalam rangka penyiapan GBS tahun 2010



